



MAJALAH Parlementaria

EDISI 206 • TH. 2022



Mandalika, Arena Prestise Bangsa



PENGANTAR REDAKSI

MANDALIKA, ARENA PRESTISE BANGSA. Tema ini diangkat oleh Tim Redaksi Majalah Parleментарia untuk disajikan secara komprehensif di edisi 206 ini. Dimana, perhelatan akbar MotoGP pertama kali digelar di bumi pertiwi tepatnya di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat. Bangsa ini tidak boleh kehilangan momentum. Dampak dari event ini harus dirasakan masyarakat baik secara langsung maupun jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap, penyelenggaraan event besar internasional ini mampu menambah devisa dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi 'Bali Baru'. Untuk mengembangkan Mandalika, Pemerintah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp250 miliar pada Desember 2015 sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan iklim investasi.

Di Rubrik Pengawasan, Tim Redaksi menampilkan berita terkait Panja Vaksin yang dibentuk Komisi IX DPR RI untuk mengawasi program vaksin dari hulu hingga hilir.

Selanjutnya, pada Rubrik Anggaran diturunkan bahasan mengenai PEN untuk BUMN Karya dalam rangka menuntaskan pekerjaan Proyek Strategis Nasional. Serta di Rubrik Legislasi, mengulas tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol yang saat ini masih menimbulkan polemik di tataran nomenklatur.

Masih banyak lagi yang disajikan *Tim Redaksi Parleментарia* seperti rubrik Sorotan, Liputan Khusus, kemudian berita mengenai kegiatan Anggota DPR RI di dapilnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusinya sebagai wakil rakyat. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

Parleментарia



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

w w w . d p r . g o . i d



Parleментарia

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak dan Media Sosial)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds,

Prima Danutirto, A.Md

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P,

Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom,

Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen,

Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi,

Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo,

Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,

R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie,

Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Aman-

da Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan,

S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu

Widyowati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,

Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, SE

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa,

Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Parlementaria

EDISI 206 • TH. 2022



- 4 DINAMIKA PARLEMEN
Harga Gas Naik Bikin Panik!
- 5 MIMBAR DEMOKRASI
Desy Ratnasari Serap Aspirasi RUU TPKS
- 6 PROLOG
Mandalika, Arena Prestise Bangsa
LAPORAN UTAMA
- 8 Pemantik Prestasi Pembalap Indonesia
- 10 Promosi Wisata di Mata Internasional
- 12 Efek Berganda Mandalika
- 14 Sirkuit, Masa Depan Bangsa
- 16 Pembenaan Yang Dikejar Target
SUMBANG SARAN
- 18 Sirkuit Mandalika Mengharumkan Nama Indonesia
PENGAWASAN
- 20 Evaluasi Vaksinasi Secara Menyeluruh
ANGGARAN
- 22 PEN BUMN Karya untuk Dukung PSN
LEGISLASI
- 24 RUU Larangan Minol : Upaya Lindungan Segenap Bangsa
- 26 FOTO BERITA
- 28 FOTO STORY

- 30 PROFIL
Mardani Ali Sera : "Anak Betawi yang Bermotivasi Tinggi"
- 34 KUNKER
- 56 SOROTAN
Konflik Wadas, Komisi III Beri Rekomendasi
LIPUTAN KHUSUS
- 58 Bahas Persiapan IPU dengan Duarte Pacheco
- 59 IPU ke-144 Suarakan Urgensi Mitigasi Perubahan Iklim
- 60 DAPIL
- 70 TOKOH
M. Akbar Kurniawan : Berkuda Sedari Muda
- 72 PERNIK
Komitmen Menuju Setjen DPR Yang Modern
- 74 KIAMAT SEHAT
Dukungan Ayah Terhadap Keberhasilan Menyusui
- 76 WISATA
Memburu Cantiknya Destinasi Kulong Biru
- 78 HOBI
Alifudin : Pilih Dengarkan Syair Ketika Senggang
- 79 POJOK PARLE
Lepas Alas Menembus Batas

HARGA GAS NAIK BUAT PANIK!



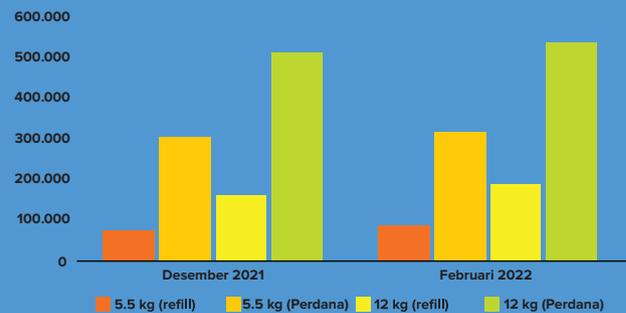
Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga secara resmi telah menaikkan harga gas elpiji non subsidi per 27 Februari 2022 dengan rata-rata kenaikan Rp 20ribu atau sekitar Rp 200ribu).

Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting beralasan kenaikan harga itu telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar elpiji nonsubsidi. Harga itu dinilai masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN.

Adapun harga elpiji nonsubsidi yang naik berukuran 5,5 kg dan 12 kg. Sedangkan, kenaikan tidak terjadi pada elpiji subsidi 3 kg. Konsumsi elpiji nonsubsidi disebut hanya 7 persen dari total konsumsi elpiji nasional, sisanya konsumsi elpiji subsidi.



**Harga Gas Elpiji Non Subsidi
DKI Jakarta per 27 Februari 2022**



Sumber : Pertamina (Persero), PT. 27 Februari 2022

**TAK AYAL, HAL INI KIAN BUAT PANIK MASYARAKAT
DI TENGAH KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN
RUMAH TANGGA LAINNYA JELANG BULAN PUASA
DAN HARI RAYA.**



“Perlu ada pemutakhiran data penerima elpiji subsidi agar skema subsidi tepat sasaran. Juga, pengawasan di lapangan harus dilaksanakan”

EDDY SOEPARNO
(Wakil Ketua Komisi VII, Fraksi PAN)



“Di saat masyarakat alami kesusahan karena COVID-19 belum reda, harga kebutuhan pokok juga terus melonjak, kini gas elpiji nonsubsidi.

Meskipun nonsubsidi tetap saja beratkan masyarakat”

DANIEL JOHAN
(Anggota Komisi IV, Fraksi PKB)



Saya sarankan pemerintah bentuk tim khusus untuk tangani persoalan pangan dan energy ini. Sehingga, pengendalian harga jelang puasa dan

lebaran dapat dilakukan

NEVI ZUAIRINA
(Anggota Komisi VI Fraksi PKS)

DINAMIKA PARLEMEN menghadirkan pandangan, masukan, serta advokasi Anggota DPR terkait isu-isu aktual sebagai wujud implementasi fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.



Desy Ratnasari Serap Aspirasi RUU TPKS

Anggota Fraksi PAN DPR RI Desy Ratnasari menerima aspirasi dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) tentang Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), di Ruang Fraksi PAN DPR RI, Kamis (27/2/2022).

Anggota Komisi X DPR RI itu mempersilakan KOPRI untuk senantiasa aktif memberi masukan dan serap aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui FPAN. Termasuk menyampaikan aspirasi agar tidak hanya perempuan yang bersuara, melainkan juga aspirasi dari kaum pria untuk mengurangi dampak psikologis terkait sudut pandang perempuan.

Anggota Baleg DPR RI itu juga berharap KOPRI terus menyampaikan informasi dan aspirasi berdasarkan fakta, objektif, dan apa adanya tentang kekerasan seksual sehingga memperkaya materi RUU TPKS, sesuai dengan kemampuan para mahasiswa.

ASPIRASI KOPRI:

KOPRI menyambut baik Fraksi PAN yang responsif sambut audiensi terkait RUU TPKS. KOPRI akan terus konsisten dalam mengawal kasus TPKS hingga di tingkat rayon (fakultas) untuk mencegah terjadinya TPKS di lingkup kecil mahasiswa. KOPRI telah melaksanakan kampanye melalui sosial media, seperti instagram dan twitter hingga menaikkan trending topic #RUUTPKS menjadi urutan kedua. KOPRI berharap mendapatkan elaborasi dan arahan terkait implementasi TPKS seperti rehabilitasi dan pemulihan.





Mandalika, Arena Prestise Bangsa

Di kawasan pesisir, di tepi laut yang indah, sebuah arena sirkuit dibangun. Kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata super prioritas. Inilah Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sini dibangun sirkuit MotoGP yang kelak akan melambungkan nama Mandalika ke pentas dunia.



BERNAMA lengkap Pertamina Mandalika International Street Circuit, kawasan ini kelak akan menjadi

ikon baru Indonesia. Saat MotoGP digelar, perhatian dunia akan tertuju

ke kawasan Mandalika. Olahraga elit dunia ini selalu menyita perhatian jutaan pasang mata penggemar balap motor kelas wahid di dunia. Sirkuit yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021 silam, sudah siap menggelar agenda tahunan MotoGP.

Sirkuit Mandalika berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,

Desa Kuta, Lombok Tengah, NTB. Kehadiran sirkuit ini tentu jadi kebanggaan pula bagi masyarakat NTB. Peralannya, kawasan ini akan selalu ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi NTB pun diharapkan melejit seiring para pembalap elit dunia mengaspal di Mandalika. Tidak hanya itu, kearifan lokal NTB lewat pariwisata akan mengemuka dan dikenal luas oleh dunia. Dampak ikutan dengan sendirinya akan menghidupkan ekonomi masyarakat setempat. Geliat usaha mikro kecil menengah (UMKM) jadi keniscayaan untuk tumbuh subur di NTB. Masyarakat pun kian sejahtera dengan kehadiran sirkuit tersebut. Inilah harapan ideal dari pembangunan KEK super prioritas.

Tahun lalu, misalnya, delegasi Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata dan olahraga telah meninjau kawasan Mandalika. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kualitas trek dan fasilitas infrastruktur sirkuit Mandalika, sudah layak menjadi tuan rumah gelaran MotoGP. Diharapkan sirkuit ini bisa dirawat dengan baik, sehingga siap menggelar *event* besar MotoGP yang tahun ini digelar pada 20 Maret 2022.

Desain Sirkuit Mandalika sendiri memiliki panjang lintasan 4,31 kilometer dengan 17 tikungan. Penyesuaian panjang sirkuit sudah mempertimbangkan keamanan dan keselamatan para pembalap. Sirkuit ini kelak mampu menampung 50.000 tempat duduk dan 135.000 penonton di tribun berdiri. *Event* olahraga kelas menengah ke atas ini tentu memiliki

tiket nonton yang tidak murah. Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini berharap agar sirkuit ini juga menggelar event lainnya yang bisa diakses kalangan menengah ke bawah.

“Contohnya, saya menawarkan pembangunan destinasi wahana dunia fantasi yang menggunakan tematik Mandalika dengan mengusung tema *bike world* (dunia motor). Contoh roller coaster bisa dibuat modelnya seperti motor Ducati atau lainnya. Kemudian pantai yang begitu indah bisa jadi *water sport tourism*, serta bisa menciptakan museum motor,” ungkap legislator dapil Jawa Barat II itu.

Kawasan wisata Mandalika dikelola oleh Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC). BUMN pariwisata ini mengelola kawasan wisata Mandalika seluas 1.175 hektar. SDM pariwisata jadi keniscayaan untuk terus diberdayakan, selain juga memberdayakan para pelaku UMKM. Senada dengan Dede, Wakil Ketua Komisi X lainnya, Hetifah Sjaifudian juga berharap, penyelenggaraan event besar internasional ini mampu menambah devisa dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Diharapkan, event besar bisa menghasilkan devisa negara, pertumbuhan ekonomi meningkat, kehidupan masyarakat sekitar terbantu, baik dari sektor perdagangan, wisata, penginapan, dan lainnya,” harap Hetifah. Politisi Partai Golkar itu mendesak, selain menggelar event MotoGP, Mandalika juga perlu menggelar even lain seperti balap sepeda dan lari. Destinasi wisatanya juga masih bisa dikembangkan dengan wisata desa, kuliner, dan produk wisata lainnya.

Sementara Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah memandang, pembangunan sirkuit ini penting untuk mendukung pengembangan *sport tourism*. Namun, ia menekankan kepada Pemerintah Provinsi NTB, agar pengembangan pariwisatanya

tidak melulu terkonsentrasi di Lombok Tengah. Pengembangannya harus mencakup seluruh wilayah di NTB.

“Jadi menurut saya, ini perlu pembicaraan yang kepada pihak-pihak terkait, guna membahas bagaimana bisa menghidupkan perekonomian seluruh daerah yang berada di Provinsi NTB. Jangan sampai hanya Lombok Tengah saja yang menjadi kawasan elit tersendiri dan akhirnya tidak bisa memberi manfaat kepada masyarakat,” kata politisi PKS itu.

Ia menyerukan, agar wisata halal di NTB terus dikembangkan berdampingan dengan pembangunan wisata lainnya. Pengembangan wisata yang ramah muslim sangat dibutuhkan untuk memberi alternatif dan kenyamanan berwisata. Tentu semua ini, lanjut Ledia, ditujukan untuk memberdayakan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Angka kemiskinan pun diharapkan turun drastis seiring pembangunan sirkuit dan objek wisata lainnya di NTB.

“Menurut saya, jika hanya mengandalkan even MotoGP saja, tentu sangat disayangkan. Ke depan bisa digunakan berbagai kegiatan lain, seperti lari maraton, balap sepeda, dan olahraga lainnya. Dengan seperti itu, anggaran yang cukup besar yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan sirkuit bisa dimanfaatkan secara maksimal dan terus dikembangkan,” kilah legislator dapil Jawa Barat I tersebut.

Akhirnya, dari Mandalika kita berharap banyak hal. Tidak saja angka kunjungan wisatawan yang meningkat, tapi juga angka kemiskinan bisa ditekan serendah mungkin. Itu artinya, tingkat kesejahteraan masyarakat setempat harus terus melejit. Begitulah ketika misi pembangunan didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak kalah pentingnya, Mandalika juga diharapkan melambungkan nama bangsa di kancah dunia. Inilah arena yang sangat prestise bagi Bangsa Indonesia. ●mh/es



Kualitas trek dan fasilitas infrastruktur sirkuit Mandalika, sudah layak menjadi tuan rumah gelaran MotoGP.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf.
Foto: Rumi/Man



Penyelenggaraan event besar internasional ini mampu menambah devisa dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Foto: Jaka/Man



Pembangunan sirkuit ini penting untuk mendukung pengembangan *sport tourism*.

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.
Foto: Jaka/Man

Pemantik Prestasi Pembalap Indonesia

Setelah seperempat abad, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang balap internasional berkat sirkuit terbarunya, Mandalika International Street Circuit yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.



SETELAH sukses menggelar ajang balap internasional *World Superbike* (WSBK) pada November 2021 lalu, Indonesia

akan kembali dihadapkan dengan gelaran bergengsi lainnya yakni MotoGP.

Hadirnya Indonesia sebagai salah satu tuan rumah balapan MotoGP 2022 mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih optimis *event* MotoGP Mandalika akan menjadi momentum para atlet Indonesia untuk meningkatkan prestasi di kancah dunia internasional.

Menurut Abdul Fikri, hal ini juga sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Keolahragaan yang menjadi usulan Komisi X DPR RI. Ia mengatakan, spirit dari UU Keolahragaan sudah disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap cabang olahraga hingga tingkat internasional.

Fikri berharap agar jangan sampai payung hukum sudah ditata dan disesuaikan dengan baik, tetapi implementasi di lapangan berbeda dengan aturan.

Misalnya, seperti yang terjadi dalam *event* MotoGP Mandalika, di mana banyak keluhan atlet yang sudah maupun belum teratasi, seperti soal aspal sirkuit.

Wakil Ketua
Komisi X DPR RI
Abdul Fikri Faqih.
Foto: Jaka/Man



“Karena itu, kita harus menyesuaikan dengan standar-standar yang ada. Kita juga harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini profesional dan kita ini siap hadapi baik *single event* maupun *multi event* termasuk MotoGP Mandalika ini,” urai Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

Sementara itu dilansir dari detik.com, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pembalap-pembalap Indonesia memiliki potensi untuk bertanding di MotoGP. Momentum hadirnya *event* MotoGP harus mendorong adanya perubahan paradigma dalam olahraga nasional.

“*Event* ini, bagus untuk generasi muda Indonesia yang tadinya pada bermimpi jadi pembalap jalanan, sekarang menjadi pembalap sirkuit beneran,” kata Erick dalam peluncuran Pertamina Grand Prix of Indonesia, beberapa waktu lalu.

Ia berharap, atlet balap Indonesia dapat meningkatkan kelas mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Mengingat, *event – event* yang akan berlangsung di Mandalika tidak hanya MotoGP, namun akan ada *event* seperti Asia Talent Cup, yang tujuannya agar ada pebalap Indonesia ikut mendunia.

“Lebih dari itu, kami berharap dengan adanya MotoGP ini bukan malah balap-balapan di jalanan karena hiburannya sudah ada. Nanti (tinggal) kami alokasikan pebalap – pebalap itu bisa ditampung juga di *event-event* yang baik supaya mereka bisa menjadi pembangunan motor balap di Indonesia,” tandas Eric.

PELUANG DESTINASI *SPORT TOURISM* DUNIA

Keuntungan lain adalah MotoGP juga bisa memberikan nilai jual tambahan untuk pariwisata Indonesia. Adanya sirkuit Mandalika untuk gelaran balap bergengsi seperti MotoGP yang berada di Lombok Tengah ini diyakini bisa beri dampak bagi kemajuan ekonomi masyarakat serta keberadaan budaya lokal.

Anggota Komisi X DPR RI A.S. Sukawijaya atau Yoyok Sukawi menilai antusiasme pebalap MotoGP ke Mandalika dalam tes pramusim MotoGP 2022 ternyata cukup tinggi. Hal ini terlihat dari ramainya unggahan para pebalap MotoGP tentang keindahan Lombok. “Ini salah satu ajang promosi pariwisata Indonesia. Selain Bali, Indonesia itu luas dan banyak kawasan yang cukup indah. Salah satunya ya Mandalika beserta kawasan di NTB,” ujar Yoyok Sukawi.

“Ini menandakan Indonesia harus lebih banyak dan harus mampu menggelar *event-event* internasional seperti MotoGP karena potensi *sport tourism* untuk mengangkat ekonomi Indonesia sangat besar,” imbuhnya.

Kendati demikian, Yoyok Sukawi mengingatkan di tengah hingar bingar MotoGP, ia kembali menggarisbawahi bahwa infrastruktur di dunia olahraga begitu penting untuk mengangkat pariwisata atau pun potensi lainnya yang dimiliki Indonesia.

“Mandalika itu infrastruktur sudah oke. Semoga ke depan tak hanya ajang balap, ajang olahraga lainnya lainnya juga sama. Infrastruktur itu harus diperhatikan supaya penggabungan potensi olahraga dan pariwisata untuk

“MANDALIKA ITU INFRASTRUKTUR SUDAH OKE. SEMOGA KE DEPAN TAK HANYA AJANG BALAP, AJANG OLAHRAGA LAINNYA LAINNYA JUGA SAMA. INFRASTRUKTUR ITU HARUS DIPERHATIKAN SUPAYA PENGGABUNGAN POTENSI OLAHRAGA DAN PARIWISATA UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI BENAR-BENAR BISA TERJADINYA”

Anggota Komisi X DPR RI A.S. Sukawijaya. Foto: Doc Pemberitaan



kebangkitan ekonomi benar-benar bisa terjadinya,” terangnya.

Indonesia sendiri dalam beberapa tahun ke depan memang berkesempatan untuk menjadi *event* olahraga internasional. Selain MotoGP, Indonesia tahun depan juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 serta Piala Dunia Basket.

“Ini saatnya melalui olahraga Indonesia bisa promosi pariwisata dan hal – hal lainnya. Semoga pemerintah bersama stakeholder yang terlibat bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk membangkitkan ekonomi kita yang terpuruk karena pandemi,” pungkasnya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah mengatakan suksesnya kawasan Mandalika menjadi brand global dengan pergelaran balapan internasional dapat membuka peluang menjadi destinasi *sports tourism*.

“Selama ini, strategi promosi pariwisata NTB masih berbiaya

mahal dengan jangkauan yang terbatas. Secara tidak langsung, pemerintah pusat mengajarkan bagaimana promosi efektif dengan event olahraga dunia,” kata Zulkieflimansyah

Dia mengatakan, kehadiran kegiatan dunia seperti MotoGP telah membuka akses mempertajam posisi NTB menggelar sportainment kelas dunia untuk mendatangkan pengunjung ke NTB. Bahkan, saat ini pihaknya telah merencanakan akan menggelar kegiatan balap dunia motocross, MXGP di Sumbawa pada 24 sampai 26 Juni 2022.

Selain itu, pemerintah akan mendorong kegiatan internasional lain yang juga direncanakan digelar di Sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Street Circuit. Harapannya, gelaran tersebut mampu mendorong bisnis pariwisata di kawasan Lombok dan Indonesia secara keseluruhan. ● ann/es



DEPUTI
Bidang Produk
Wisata dan
Penyelenggara
Kegiatan
Kemenparekraf
Rizki Handayani
menerangkan,
Mandalika telah

menjadi destinasi super prioritas.

Ia menambahkan, perhelatan ajang balap motor internasional tersebut, memiliki banyak penggemar di dunia. Hal itu akan mempromosikan Indonesia, terutama Mandalika. Selain itu, MotoGP juga membuat fasilitas pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat. Dengan promosi mendunia, menurut Rizki, maka NTB akan menjadi destinasi internasional.

Wakil
Ketua
Komisi
X DPR
RI,



Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Hetifah Sjaifudian. Foto: Jaka/Man

Promosi Wisata di Mata Internasional

**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
melihat dengan perhelatan MotoGP 2022
Mandalika membuat Lombok berpotensi menjadi
destinasi pariwisata internasional.**

Hetifah Sjaifudian mengingatkan agar Pengelola hotel dan transportasi di sekitar kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, tidak 'nakal' dengan menaikkan tarif inap dan sewa transportasi, jelang perhelatan ajang balap motor internasional, MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika.

Menurutnya, ulah 'nakal' pengelola dengan memainkan tarif inap dan sewa transportasi bukan saja merusak pariwisata Mandalika dalam jangka panjang, namun juga berpotensi mencoreng nama Indonesia di mata dunia.

"Saya tegaskan agar pengelola hotel dan transportasi berlaku bijak

dalam memasang tarif," ujar Hetifah kepada **Parlementaria**.

Tak hanya itu, Politikus Partai Golkar itu mendorong pemerintah daerah agar berperan dalam menanggapi persoalan tersebut. Ia pun meminta agar Gubernur NTB mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat mengontrol tarif penginapan dan transportasi sewa di sekitar Mandalika.

"Hal ini harus cepat ditanggapi dengan regulasi, bukan sekedar imbauan," kata Hetifah.

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah turut memberikan tanggapannya terhadap Mandalika. Dirinya menilai, pembangunan Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan hal penting guna mendukung pengembangan *sport tourism*.

Namun ia menekankan kepada Pemerintah Provinsi NTB, bisa mengembangkan potensi keseluruhan daerah untuk dapat berkembang

secara bersama-sama guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masyarakatnya. Artinya, tidak hanya Lombok Tengah saja yang berkembang, namun harus keseluruhan.

"Jadi menurut saya, ini perlu pembicaraan yang sangat penting kepada pihak-pihak terkait, guna membahas bagaimana



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Lombok Tengah, NTB.
Foto: RumiMan

bisa menghidupkan perekonomian seluruh daerah yang berada di Provinsi NTB. Jangan sampai hanya Lombok Tengah saja yang menjadi kawasan elite tersendiri dan akhirnya tidak bisa memberi manfaat kepada masyarakat,” kata Ledia ketika ditemui tim Parlemen beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap ke depannya seluruh pemda di NTB bisa menghidupkan wisata halal yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup guna meminimalisir angka kemiskinan. Ke depannya juga diharapkan seluruh daerah di NTB bisa berkembang bersama-sama, dan menjadi destinasi wisata berskala Internasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf juga mengungkapkan bahwa event-event yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, baik itu World Superbike (WSBK) hingga MotoGP merupakan daya tarik bagi masyarakat menengah ke atas, sehingga tiket nonton yang dijual bisa terbilang cukup mahal. Maka dari itu, Dede

menginginkan ke depan, harus ada event ataupun daya tarik lainnya di sekitar sirkuit yang sifatnya *middle to low*.

Dengan hadirnya beberapa destinasi wisata itu, kata Dede, bisa menciptakan masyarakat yang tidak bisa menyaksikan event karena faktor mahalnya harga tiket nonton, atau penyelenggaraan event yang tidak setiap tahun, namun bila ada destinasi wisata lain bisa ikut merasakan kawasan Mandalika dan bisa setiap hari dikunjungi.

Dalam keberjalanannya, Tinggal dua pekan lagi pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022, kabarnya penjualan tiket masih jauh dari target. Dari 63.000 tiket yang disediakan untuk ajang MotoGP Mandalika 2022, hingga saat ini yang baru laku terjual sebanyak 22.300 tiket.

Seretnya penjualan tiket MotoGP Mandalika 2022 menimbulkan isu baru di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kabar beredar Pemprov NTB mewajibkan para ASN untuk menonton MotoGP Mandalika 2022 dan membeli tiketnya.

Diketahui, sejumlah faktor mempengaruhi penjualan tiket. Di

antaranya, terkait kebijakan protokol kesehatan, sehingga masyarakat harus menyiapkan biaya ekstra untuk tes antigen.

Selain itu, diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta agar jumlah penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, untuk diturunkan. Pihak Mandalika Grand Prix Association (MGPA) pun menyetujui arahan tersebut. Dari yang awalnya jumlah penonton direncanakan hingga 100.000 orang, akan dikurangi menjadi hanya 60.000 penonton. Langkah ini diambil untuk menghindari meluasnya penularan Covid-19.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi mengatakan, Aparatur Sipil Negara di Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal diwajibkan untuk membeli tiket MotoGP 2022 Mandalika. Lalu menjelaskan, Pemprov NTB tengah berusaha untuk meningkatkan penjualan tiket. Sebab, per 20 Februari, penjualan tiket baru mencapai 21.530 tiket. Sedangkan target penjualan yang ditentukan Pemprov NTB yakni hingga 35.000 tiket.

Pemprov NTB kepada ASN-nya mewajibkan membeli 4.000 tiket. Untuk bupati dan wali kota se-NTB 16.000 tiket. Kemudian klaster kapolda, kapolres, danrem, danlanal, danlanud 2.000, serta instansi vertikal daerah 2.000 tiket. Sedangkan klaster BUMN dan perbankan 2.500 tiket, asosiasi profesi 2.000 tiket, guru dan pelajar 2.500 tiket, ustad dan santri 500 tiket.

Lalu menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan konsolidasi. Diharapkan dari dukungan klaster ini, penjualan tiket mencapai target 35.000 tiket. Penjualan tiket Sebenarnya animo masyarakat terutama masyarakat NTB untuk menyaksikan perhelatan MotoGP cukup tinggi. ● hal/es

Efek Berganda Mandalika

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika disebut telah menciptakan efek berganda di sekitar kawasan tersebut, mulai dari bermunculannya *homestay* atau penginapan, tumbuhnya IKM, dan tumbuhnya usaha tempat makan atau restoran, souvenir, rental mobil, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, keberadaan KEK Mandalika juga mampu meningkatkan jumlah wisatawan berkat sejumlah atraksi wisata di sekitar KEK ini seperti Desa Sade, Desa Sukarara, dan lain-lain.



WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu proyek strategis

nasional yang diharapkan menjadi 'Bali Baru'. Hekal mengatakan, untuk mengembangkan Mandalika, Pemerintah menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp250 miliar pada Desember 2015 sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan iklim investasi.

"Kita datang ke sini (Mandalika) karena memang ini salah satu program untuk pengembangan 10 daerah wisata selain Bali. Salah satunya adalah Kawasan Mandalika. Semoga bisa menjadi 'Bali Baru' dan kebetulan Mandalika adalah BUMN yang merupakan mitra Komisi VI," kata Hekal kepada **Parlementaria**.

Legislator Partai Gerindra itu mengatakan, melalui PMN tersebut, pembangunan KEK Mandalika

diharapkan mampu menarik investasi sebesar Rp28,6 triliun dan 2 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019. "Bahkan sudah mendapat pinjaman sekitar Rp3,6 triliun untuk penambahan lainnya. Tapi itu bermula dari PMN yang dulu kita sepakati bersama dengan Komisi VI, sekarang bahkan sudah teken kontrak dengan MotoGP yang akan dilaksanakan pada tahun 2021," tegasnya.

Sedangkan Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama pun menyoroti, Kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, ke depan juga diharapkan dapat turut melibatkan

masyarakat lokal.

"Jangan sampai pembangunan kawasan pariwisata ini malah hanya menjadikan masyarakat setempat sebagai penonton atau tidak mendapat apa-apa. Padahal ini kampung mereka, nenek moyang mereka ada di sini. Oleh karena itu saya berharap ke depan dalam pengelolaan kawasan ini juga memperhatikan pelibatan masyarakat lokal," pinta Suryadi.

Politisi dapil NTB II ini menambahkan pelibatan masyarakat tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepariwisataan. Sehingga mereka



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. Foto: Oji/Man

sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan turis atau wisatawan. Hal tersebut sudah mulai dirintis oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah pusat lewat pembangunan sekolah pariwisata.

“Cara lain yang bisa dilakukan untuk melibatkan masyarakat lokal dalam kawasan pariwisata baru ini adalah dengan memberikan ruang atau area khusus bagi masyarakat lokal menjual kerajinan tangan dan produk-produk lokal yang dihasilkannya. Sehingga mereka tidak kehilangan mata pencahariannya, serta tidak merasa tersisih dari sebuah pembangunan,” pungkas politisi dari fraksi PKS ini.

Data dari pemerintah pusat menjelaskan bahwa perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika International Circuit ini telah menciptakan 11.000 lapangan kerja selama tes pramusim. Peningkatan ekonomi berkat MotoGP 2022 tak hanya akan berdampak kepada Lombok, tetapi juga NTB dan sekitarnya. Bahkan, pada bulan depan saat race berlangsung, diperkirakan lapangan kerja akan mencapai 50.000 di beberapa sektor tertentu dari seluruh rangkaian MotoGP 2022. Diyakini akan ada dampak berkelanjutan pada 10 sektor prioritas pariwisata dari kegiatan ini.

Di sisi lain, persiapan event internasional tersebut menurut Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade terancam tidak optimal karena kurangnya likuiditas *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) akibat pandemi Covid 19. Dari informasi yang diterimanya, ITDC sebagai pemilik sirkuit dan pemegang saham 100 persen di MGPA (Mandalika Grand Prix Association) membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung sirkuit Mandalika.

“Kebutuhan dana untuk menyiapkan event MotoGP di bulan Maret 2022 ini mencapai sekitar Rp400 miliar. Kita tahu bahwa ITDC kesulitan memenuhi kebutuhan ini karena rendahnya *cash availability* akibat Covid-19. Pesan saya, Jangan sampai event internasional ini tidak optimal. Kita harus cari solusinya

bersama” jelas Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Untuk itu, politisi asal Sumatera Barat ini mendorong agar Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dapat duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Dia pun meminta langkah perubahan peruntukan PMN ini melibatkan Kejaksaan, BPK hingga BPKP sebagai upaya untuk menjalankan *good governance* dan prinsip kehati-hatian.

“Terkait hal ini, sebenarnya ada solusinya yaitu dengan cara mengubah peruntukan PMN tahun 2021 ke ITDC yang awalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur Kawasan

Tana Mori-Labuan Bajo, menjadi diperuntukkan untuk Mandalika, sebagai gantinya pada tahun 2022 holding pariwisata PT Aviata akan mendapat tambahan PMN sebesar Rp7,5 Triliun dan ITDC Rp1 Triliun untuk Mandalika. Nah, Sebagian PMN ke ITDC di tahun 2022 ini dapat dialihkan kembali untuk Tana Mori, Labuan Bajo. Jadi, usulan ini hanya mengubah timing penggunaan saja karena Mandalika lebih urgent. Untuk itu, saya mendorong Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus duduk bersama. Saya pikir ini adalah langkah yang *win-win solution*,” terangnya. ● hal/es

“JANGAN SAMPAI PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA INI MALAH HANYA MENJADIKAN MASYARAKAT SETEMPAT SEBAGAI PENONTON ATAU TIDAK MENDAPAT APA-APA. PADAHAL INI KAMPUNG MEREKA, NENEK MOYANG MEREKA ADA DI SINI.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: Andri/Man





Sirkuit Masa Depan Bangsa

Sirkuit Internasional Mandalika di Nusa Tenggara Barat baik fasilitas, infrastruktur jalan, maupun sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung *event* internasional MotoGP Mandalika diapresiasi dan diakui kehebatannya oleh DPR RI. Sirkuit yang secara resmi bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit itu dinilai telah sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan dan menjadi kebanggaan NTB karena memiliki sirkuit sekelas MotoGP.



DARI segi penyelenggaran terutama sarana prasarana maupun fasilitas Sirkuit Mandalika dalam menyambut perhelatan

balapan dunia tersebut dinilai sudah cukup memuaskan. Mulai dari segi persiapan progres pembangunan *by pass* dari bandara ke KEK Mandalika yang terbilang baik hingga terselenggaranya MotoGP Mandalika dengan sukses.

“Harapan kedepannya, Sirkuit



Anggota Komisi V DPR RI
Sudewo. Foto: Arief/Man

Internasional Mandalika usai pergelaran MotoGP Mandalika dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat NTB khususnya dalam melahirkan pembalap-pembalap nasional juara dunia,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Sudewo baru-baru ini.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI telah memastikan prasarana penunjang Sirkuit Internasional Mandalika dalam menyambut *event* MotoGP 18 sampai dengan 20 Maret 2022 yang telah berlangsung ini. Komisi V DPR RI sangat mengapresiasi seluruh pihak penyelenggara maupun Pemprov yang sudah sangat siap menyelenggarakan ajang balap bertaraf internasional MotoGP Mandalika.

AKSES GILI MAS PERLU DILEBARKAN

Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian khusus agar kedepannya Mandalika semakin sempurna dalam menyambut pergelaran MotoGP Indonesia di masa yang akan datang. Pasalnya, gelaran balap ini merupakan ajang internasional yang akan terus menjadi perhatian dunia internasional.

Akses jalan dari Pelabuhan Gili Mas ke Sirkuit Mandalika di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dinilai masih terlalu sempit sehingga harus diperlebar. Namun demikian, pembangunan dan pembenahan Pelabuhan Gili Mas yang dilakukan terus menunjukkan progres yang sangat baik. Pelabuhan tersebut dalam tahap penyelesaian terminal peti kemas dan berbagai fasilitas serta prasarana.

“Kesiapan Gili Mas sebagai salah satu pintu masuk wisatawan yang nanti akan menjadi tamu di MotoGP sudah cukup baik, tapi yang menjadi kendala memang akses jalannya masih agak sempit. Sehingga kita akan perjuangkan supaya bisa diperlebar, agar mobilitas orang dan barang bisa lebih lancar nanti pada saat *event* MotoGP mendatang usai MotoGP Mandalika 2022,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama.

Meski kesiapan Pelabuhan Gili Mas sudah memadai dan baik, namun masih perlu perbaikan akses. Diantaranya rambu-rambu jalan yang masih sangat kurang, bahkan ada opsi untuk membuat jalan alternatif baru dengan rute yang lebih pendek. Maka, opsi tersebut akan diusulkan Anggota DPR RI dari NTB tersebut ke Pemerintah Pusat yaitu dari Gili Mas langsung ke Mandalika yang bisa memotong hampir setengah dari rute yang sudah ada sekarang.

PERLU KOORDINASI LINTAS KOMISI DAN KEMENTERIAN

Tak hanya itu, otoritas bandara juga diingatkan tidak hanya terfokus pada penerbangan yang sifatnya komersial saja. Menurut Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, MotoGP adalah *event* dunia yang penikmatnya itu dari seluruh dunia dan merupakan *event* yang akan selalu menjadi bagian dari sejarah Indonesia dalam pengembangan lomba internasional kedepannya

Di samping pesawat komersial akan banyak juga *private jet*, helikopter dan seterusnya dan itu yang saya ingatkan. Jadi Mulyadi meminta jangan hanya terfokus kepada pesawat komersial, daya dukung apapun semua harus disiapkan, bukan dalam bentuk infrastrukturnya saja. *Event* MotoGP merupakan tugas bersama dan cermin bagaimana sinergitas semua stakeholder harus dikedepankan.

Maka kedepannya perlu ada koordinasi lintas Komisi di DPR RI dengan berbagai kementerian agar persiapan *event* internasional MotoGP selanjutnya yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendatang dapat semakin berjalan dengan maksimal.

“Koordinasi lintas Komisi bersama Pemerintah mendesak dilakukan untuk memastikan semua aspek berjalan maksimal. Jangan sampai kedepannya *event* yang begitu besar ternyata masih ada kekurangan. MotoGP adalah ajang berkelas dan merupakan *event* yang akan selalu menjadi sorotan mata

JANGAN SAMPAI KEDEPANNYA EVENT YANG BEGITU BESAR TERNYATA MASIH ADA KEKURANGAN. MOTOGP ADALAH AJANG BERKELAS DAN MERUPAKAN *EVENT* YANG AKAN SELALU MENJADI SOROTAN MATA DUNIA KARENA MOTOGP MERUPAKAN PERGELARAN LOMBA INTERNASIONAL YANG MEMPERTARUHKAN NAMA BESAR INDONESIA.

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi. Foto: Ariel/Man



dunia karena MotoGP merupakan pergelaran lomba internasional yang mempertaruhkan nama besar Indonesia,” pungkas Mulyadi. ● pun/es

Pembenahan yang Dikejar Target

Ajang balapan motor paling bergengsi di dunia MotoGP resmi digelar di tanah air pada 18 sampai dengan 20 Maret di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).



SUKSESNYA

gelaran taraf internasional tersebut tak lepas dari berbagai persiapan yang telah dilakukan. Sirkuit yang

secara resmi bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit itu diklaim berkualitas dari segi pembangunan oleh arsitek ternama, berkualitas tinggi serta menggunakan material terbaik dunia dan pengerjaannya sesuai jadwal.

Tak ada gading yang tak retak, peribahasa tersebut tampaknya ternyata sempat juga terjadi dalam berbagai jelang persiapan MotoGP Mandalika. Posalnya, diluar dugaan jelang hari-H dimulainya ajang balap motor kelas dunia itu ditemukan beberapa sektor yang wajib segera dibenahi demi kesempurnaan event. Beruntung, pihak penyelenggara dalam hal ini *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dengan sigap

menunaikan tugasnya sehingga MotoGP Mandalika 2022 berjalan sesuai harapan.

Eddy Saputra, *Deputy Race MotoGP Mandalika 2022*, saat ditemui **Parlementaria** Jumat (4/3/2022) baru-baru ini mengapresiasi berbagai perbaikan yang telah dilakukan salah satunya aspal sirkuit yang telah diaspal ulang. Saat wawancara, ia mengakui turut berperan dengan memberikan berbagai saran dan masukan kepada ITDC selaku penyelenggara yang berwenang untuk segera melakukan berbagai pembenahan.

“Berkaca dari pengalaman berbagai ajang balap internasional yang telah digelar sebanyak dua kali salah satunya seri WBSK yang belum lama digelar, ternyata menuai sorotan dimana terjadi cederanya beberapa pembalap. Bahkan sampai terjatuh akibat aspal batunya yang terkelupas hingga aspal jadi berdebu. Maka, saya sarankan kepada pihak ITDC dan MGPA untuk lebih baik memastikan lebih dulu sirkuit sudah benar-benar layak digunakan sebelum MotoGP dimulai demi semakin tercapainya sirkuit berkelas standar internasional,” ujar Eddy.

Direktur Off The Road IMI
Eddy Saputra. Foto: Ariel/Man



Eddy yang juga diamanahkan sebagai Direktur Off The Road Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menginginkan jangan sampai pihak penyelenggara MotoGP Mandalika mengalami kerugian. Karena, berdasarkan pengamatannya jika saat itu pengaspalan ulang sirkuit sampai tidak segera dieksekusi maka bisa menimbulkan MotoGP Mandalika di-reschedule ulang bahkan potensi resiko terbesar yakni disetop saat berlangsungnya gelaran balapan internasional tersebut.

Positioning IMI yang dalam gelaran MotoGP Mandalika sebagai regulator, maka sudah tentu sudah kewajiban mutlak bagi IMI untuk berperan aktif dengan ikut serta memberikan imbauan baik kepada pihak pengelola sirkuit maupun pemerintah. Utamanya, untuk memastikan segi safety atau keamanan serta keselamatan masing-masing pembalap yang mengikuti MotoGP dapat terjamin dengan sebaik-baiknya.

“Kalau sirkuit urusannya ITDC MGPA. Saat meeting mingguan rapat koordinasi dengan Menteri Pariwisata sebagai Ketua Pelaksana, Pak Hadi Tjahjanto sebagai Koordinator Lapangan, ITDC selaku pemilik sirkuit dan Pak Gubernur NTB waktu itu saya pernah sarankan demikian bahwa lebih baik pengaspalan dipastikan sampai sirkuitnya benar dulu sebelum digelar. Alhasil pengaspalan ulang sirkuit yang digelar sekitar dua minggu sampai dengan 10 Maret 2022 sebelum digelarnya event balap sukses dilaksanakan,” tandas Eddy.

ITDC dan MGPA kemudian lantas melakukan pembenahan jelang balapan MotoGP 2022 Indonesia dengan perbaikan Sirkuit Mandalika. Pembenahan dilakukan terhadap berbagai hal mulai dari sirkuit, fasilitas pendukung, akomodasi, hingga teknis penyelenggaraan. Terutama, pembersihan dengan Track Jet Truck dimana kendaraan ini memiliki penyemprot air bertekanan tinggi dan juga dilengkapi dengan *rotating brush*. Penyempurnaan sirkuit menjadi hal yang utama agar kondisi lintasan sesuai dengan standar dari Federasi Balap Motor Internasional (FIM) sesuai imbauan IMI.



**HARUSNYA
KEHADIRAN MOTOGP
DI SIRKUIT MANDALIKA
YANG SUKSES DIGELAR
BISA JUGA JADI
PEMACU MOTIVASI
BAGI TIAP PEMBALAP
UNTUK SUATU
SAAT BISA TURUT
BERPARTISIPASI
MERASAKAN
ATMOSFER BALAP DI
SIRKUIT MANDALIKA
YANG BERKELAS
INTERNASIONAL”**

Direktur Off The Road IMI Eddy Saputra. Foto: Ariel/Man

**HEAD TO HEAD MANDALIKA VS
SEPANG**

Di sisi lain, sebagaimana kehadiran sirkuit berkelas internasional MotoGP yang terlebih dulu ada di negara tetangga seperti Malaysia yang memberikan berbagai dampak positif, Eddy berharap hal serupa juga dapat diberikan sumbangsinya oleh kehadiran sirkuit MotoGP yang berada di Mandalika tersebut terhadap kemajuan perekonomian negara khususnya sektor UMKM masyarakat yang berada di sekitaran wilayah NTB.

Tak hanya dampak ekonomi, kehadiran Sirkuit Mandalika seperti halnya Sepang dapat juga memicu lahirnya para pembalap nasional andalan baru. Belajar dari Sepang, kehadiran sirkuit tersebut berhasil menghadirkan bertumbuh pembalapnya baik dari jumlah dan kualitas pembalap-pembalap Malaysia yang handal berkat efek positif dari rutusnya latihan berupa *event* baik *event* lokal maupun internasional yang konsisten digelar di Sepang.

“Di Malaysia mengalami banyak pertumbuhan pembalapnya baik dari jumlah dan kualitas berkat efek positif dari hadirnya sirkuit Sepang. Harusnya kehadiran MotoGP di sirkuit Mandalika yang sukses digelar bisa juga jadi pemacu motivasi bagi tiap pembalap untuk suatu saat bisa turut berpartisipasi merasakan atmosfer balap di sirkuit Mandalika yang berkelas internasional,” tutur Eddy.

**KEJURNAS DAN KEJURDA SIRKUIT
MANDALIKA**

Sehingga, diharapkan sirkuit Mandalika kedepannya tidak hanya digunakan ajang Moto GP semata serta *event* internasional lainnya. Lebih dari itu, di sirkuit Mandalika diharapkan dapat terus dimanfaatkan untuk latihan serta *event* lokal seperti Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Daerah (Kejurda) yang secara reguler digelar. Seperti halnya pemanfaatan Sirkuit Sepang Malaysia yang setiap bulan rutin diadakan latihan dan *event* lokalnya di Sepang yang sukses melahirkan para pembalap juara dari Malaysia.

Mengingat IMI bukan promotor namun hanya sebatas regulator, Eddy menyatakan kedepannya IMI meminta kepada pemilik sirkuit untuk menyelenggarakan Kejurnas atau Kejurda serta berbagai support seperti penyediaan sponsor. “Pembalap nasional diharapkan dengan berlatih melalui dukungan dari tempat pembalap bernaung. Jadi hadirnya *event* MotoGP Mandalika ini memang merupakan momentum yang sangat bagus, hadir tepat dan waktu tepat sasaran,” tutup Eddy. ● pun/es



Oleh: Ahmad 'Adi' Jayadi
Pembalap Road race 90an dan
MotoGP125 96-97

Sirkuit Mandalika Mengharumkan Nama Indonesia

Kita harus bangga karena pada akhirnya Indonesia bisa kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah MotoGP lagi setelah kita vakum 20 tahunan lebih. Setelah pada 1996 dan 1997 kita juga pernah jadi tuan rumah MotoGP di Sirkuit Sentul. Ketika itu, saya turun dengan wild card di GP 125.

Waktu itu Valentino Rossi belum main. Pada 1997 Rossi baru tampil dan mulai terkenal setelah tampil 1997 di Sentul itu. Di era saya nama-nama seperti Michael Doohan, Tetsuya Harada, dan Max Biaggi cukup harum. *Nah*, sekarang kita kembali mendapat kehormatan jadi tuan rumah MotoGP, apalagi kontrak Indonesia dengan DORNA (pemegang hak komersial MotoGP) itu 10 tahun. Ini sangat bagus untuk Indonesia. Pemasukan devisa dengan kedatangan banyak turis akan melejit dan nama Indonesia, khususnya Lombok semakin harum dan dikenal dunia.

Saya termasuk beruntung, meski sudah tak jadi pembalap, tapi sudah dua kali bisa merasakan bagaimana getaran Mandalika jelang balapan dunia MotoGP nanti. Pertama ke Mandalika itu saat gelaran Superbike pada November 2021, saat itu saya diajak oleh MolaTV.

Yang kedua, saya pergi saat tes MotoGP, Februari 2022. Saya pergi bersama IMI sebagai *marshall leader* saat tes resmi pada 10-13 Februari 2022. Saya merasa sangat beruntung bisa hadir sebagai *marshall leader* bersama tim-tim IMI yang ada di MotoGP. Kami jadi belajar banyak dan semakin familiar dengan MotoGP terkini.

Saat saya balap di MotoGP 1996 dan 1997 sudah jauh berbeda dengan sekarang. Dengan 2 kali dapat kesempatan ke Sirkuit Mandalika untuk Superbike dan Tes resmi MotoGP bulan lalu, saya semakin mengenal dan dekat dengan *environment* MotoGP era sekarang. Setelah saya bertugas di lapangan untuk pengecekan marshall di lapangan di setiap pos, saya jadi tahu detail tentang sirkuit Mandalika ini. Karakter sirkuitnya benar-benar sempurna, punya *high speed corner*, *slow corner*, dan *u-turn*. Semua sangat lengkap.

Posisi sirkuit Mandalika memiliki pemandangan bukit dan pantai. Para pembalap pun jadi semakin nyaman

dan enak memandang. *View* Mandalika benar-benar *the best*. Saat saya muter sepanjang sirkuit ini, memang benar-benar standard FIA dan ini benar-benar sirkuit terbaik. Tinggal bagaimana *maintain*-nya saja. Dengan sirkuit Mandalika ini nama Lombok dan Indonesia akan semakin *booming*. Apalagi, pembalap asing rata-rata suka sekali dengan *view* di Mandalika ini.

Sejalu lagi, saya yakin nama Lombok akan mendunia. Objek dan perlengkapan di seputar sirkuit harus benar-benar disempurnakan. Paket-paket wisata ke Indonesia pun tentu harus dipersiapkan. dengan hadirnya MotoGP ini, tentu saja para pembalap dan semua penonton luar negeri ingin berwisata di seputaran kawasan sirkuit. Kita perlu belajar dari Malaysia yang memiliki sirkuit Sepang. Mereka juga membuka *tour* wisata ke Genting Island dan Langkawi yang telah mendarangkan banyak devisa.

Pelatihan dan tutorial juga jadi keniscayaan untuk dilakukan bagi para pedagang produk souvenir di seputar sirkuit. Bentuknya bisa berupa seminar yang digelar pemerintah daerah. Pelatihan bagaimana mengemas

produk dagangan dan marketing harus diberikan. Keramahan juga harus kita tunjukkan kepada para tamu asing yang datang ke Lombok, NTB. Menjajakan dagangan harus sepenuh hati tanpa memaksa.

Dengan keramahan, nama Indonesia akan terus dikenal baik di mata dunia. Di luar orang akan bicara kalau kita bangsa yang ramah. Jad, panitia atau pemerintah setempat harus menyiapkan segalanya menyambut MotoGP. Pastinya Lombok akan ramai dan sibuk dikunjungi para wisatawan, baik yang

OBJEK DAN PERLENGKAPAN DI SEPUTAR SIRKUIT HARUS BENAR-BENAR DISEMPURNAKAN. PAKET-PAKET WISATA KE INDONESIA PUN TENTU HARUS DIPERSIAPKAN. DENGAN HADIRNYA MOTOGP INI, TENTU SAJA PARA PEMBALAP DAN SEMUA PENONTON LUAR NEGERI INGIN BERWISATA DI SEPUTARAN KAWASAN SIRKUIT.

datang dari pelabuhan dan bandara. Tentu ini butuh pengawasan lebih. Pemerintah lokal dan panitia sudah harus siap untuk mengantisipasi dengan keramaian nanti. Akses jalan masuk ke sirkuit harus bagus.



Harapan saya, euforia MotoGP ini jangan instan. Kita harus pertahankan image baik ini. Hotel-hotel atau *shuttle bus* dan akomodasi lainnya jangan sampai tarifnya naik tak terkendali. Apalagi, kita akan sepuluh tahun jadi penyelenggara sesuai kontrak. Jadi, kita harus tunjukkan yang terbaik di ajang perdana ini supaya tahun-tahun mendatang penonton semakin banyak berdatangan.

Event MotoGP di Mandalika tentu kebanggaan bagi kita semua dan juga para penggemar motor di Indonesia. Indonesia adalah pengguna motor terbesar, hingga mencapai 125 juta pengguna sepeda

motor. Tentu bisa dibayangkan bagaimana bangganya mereka. Apalagi, saya sebagai mantan pembalap yang pernah ikut MotoGP di GP123. Saat ini sudah ada pembalap lokal seperti Mario Aji yang bergabung dengan tim Honda Asia.

Dia akan turun di Moto3, seperti saya ketika di GP125 MotoGP 1997. Kita harus beri applaus luar biasa kepada Mario Aji. Jangan terlalu tinggi ekspektasinya, karena Mario Aji masih dalam proses. Mungkin dua atau tiga tahun ke depan baru kita bisa berharap lebih kepada Mario Aji. Di Qatar, dia bisa finis ke-19. Semoga nanti di Mandalika dia bisa lebih bagus lagi. ●

Evaluasi Vaksinasi Secara Menyeluruh

Komisi IX DPR RI akhirnya sepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) tentang Vaksin untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang sedang digencarkan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) serta Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada tanggal 18 Januari 2022 lalu.

Komisi IX melakukan rapat internal internal pada tanggal 21 Januari, semua fraksi setuju dibentuk Panja Vaksin, masing-masing partai menyetorkan nama dan dibentuk susunan Panjanya. Dan masa sidang berikut baru direncanakan untuk dilakukan rapat.

Dijelaskan Ketua Panja Vaksin Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, pembentukan Panja Vaksin merupakan bentuk tanggungjawab wakil rakyat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan vaksinasi dalam menurunkan kurva Covid-19 di Indonesia.

“Terdapat sejumlah hal yang akan dialami Panja Vaksin ini,” katanya saat dihubungi *Parlementaria* melalui sambungan telepon baru-baru ini.

Saat ini, lanjut Melki, Panja Vaksin Komisi IX sudah mulai menyusun sejumlah agenda kerja. Ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan Vaksinasi, seperti Anggaran, pengadaan vaksin, tata kelola vaksin, vaksin hibah, vaksin kadaluarsa, kehalalan vaksin, target serta cakupan vaksinasi, kemandirian vaksin dalam negeri, juga berbagai isu dan permasalahan lainnya.

“Vaksinasi saat ini menjadi kunci penting perlindungan diri melawan Virus Covid-19 untuk itu beberapa hal perlu dicermati Panja untuk mendukung sukses kebijakan vaksinasi,” katanya.

Panja Vaksin juga ingin memastikan semua pemangku kepentingan dengan peranannya masing-masing terlibat dalam pelaksanaan serta keamanan vaksinasi yang digunakan. Karena, nanti Panja akan menggelar Rapat Kerja, RDP dan RDPU dengan pihak terkait.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.
Foto: Munchen/Man

“Keterlibatan semua pihak menjadi penting termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini tidak lain untuk menjaga transparansi pelaksanaan vaksinasi dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi primer dosis pertama dan dosis kedua. Pasalnya masih banyak daerah yang belum mencapai target,” kata Legislator F-Golkar itu.

Melki berharap, pembentukan Panja Vaksinasi diharapkan dapat menyelesaikan hal-hal terkait program vaksin. “Kami (Komisi IX) berharap pembentukan Panja dapat memperbaiki pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi ini,” tutupnya.

MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan Komisi IX membentuk panja yang khusus permasalahan vaksinasi karena banyak permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi.

“Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panja vaksin,” ungkapnya.

Hal itu sebagai bentuk respon banyaknya masalah seputar vaksinasi. Baru-baru ini saja, publik dikejutkan dengan vaksin palsu dan vaksin kosong yang beredar di tengah masyarakat.

“DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak. Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Karena itu, pembentukan Panja Vaksinasi diharapkan dapat menyelesaikan hal-hal terkait program vaksin. Mulai dari merespons dan menyoroti mengenai roadmap vaksin primer dosis pertama dan dosis kedua, anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, juga berbagai isu dan permasalahan lainnya.

“Banyak hal yang akan kita dalam, sebut saja, jenis dan ketersediaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, Vaksin untuk lansia dan Vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kadaluarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi,” tutur Netty.

ASPEK KEHALALAN JUGA JADI FOKUS

Disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari, salah satu fokus pembahasan dalam Panja Vaksin Komisi IX ialah aspek kehalalan. Menurut Putih Sari aspek kehalalan penting mengingat kebutuhan dan pengembangan vaksin terus dilakukan oleh banyak negara.

“Ya, karena pengembangan vaksin terus dilakukan oleh banyak negara, dan kemungkinan ketersediaan vaksin halal ke depan. Maka pertimbangan kehalalan masuk dalam salah satu pembahasan vaksin,” jelasnya.

Selain aspek kehalalan vaksin, ada sejumlah isu lain yang juga akan dibahas. Termasuk kata Putih timetable Panja itu sendiri. Nantinya, Panja Vaksinasi Covid-19 bakal mengawasi proses vaksinasi dari hulu ke hilir. Dengan begitu diharapkan program vaksinasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target tercapai. Ia meminta program vaksinasi dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Dari mulai ketersediaan vaksin, lalu juga aspek keadilan sosial dari vaksin tersebut, kemudian juga bagaimana tata kelolanya. Ini kan harus transparan, harus akuntabel, dan jangan sampai proses vaksinasi ini terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara, dimana isu vaksin halal akan menjadi perhatian oleh Panja Vaksin tersebut. Dewi menegaskan Panja Vaksin nantinya akan memanggil



“DPR BERUSAHA MEMBANGUN KEYAKINAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN MENEKAN PEMERINTAH UNTUK MENG-GAUNGKAN BAHWA VAKSIN HALAL DAN AMAN UNTUK MASYARAKAT TERUTAMA ANAK-ANAK. TAPI, HAL TERSEBUT DIRUSAK OLEH OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB”

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.
Foto: Munchen/Man

berbagai stakeholder dalam program vaksinasi, seperti Kemenkes, Badan POM maupun BUN yang bertugas mengadakan vaksin di Indonesia. ● rnm/es

DPR RI menyoroti BUMN Karya yang memperoleh PMN di tahun lalu dan tahun ini agar bisa semakin efektif dan mengupayakan proyek pembangunan nasional itu seoptimal mungkin.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI HM. Said Abdullah mengatakan BUMN Karya mendapatkan bantuan PMN agar bisa menyelesaikan proyek penugasan pemerintah tersebut. Dimana kebutuhan pendanaannya itu sebesar Rp240 triliun. Namun, negara diketahui hanya menyetujui beberapa persen saja PMN untuk BUMN Karya dari kebutuhan itu.

“Kami setuju terhadap PMN itu diberikan, akan tetapi persetujuan kami itu sesungguhnya dalam kerangka penguatan modal, *equity*-nya BUMN,” sebut Said. Selain itu ada proyek PSN yang tak bisa dihindari memerlukan dukungan anggaran untuk mengerjakannya.

Salah satu PSN yang memerlukan asupan dana besar ialah proyek tol Trans Sumatera. Menurut Said pemerintah dan DPR memahami tol Trans Sumatera tidak akan menghasilkan efek ekonomi yang signifikan dalam jangka waktu 5-8 tahun. Meski begitu, proyek tersebut tetap harus dirampungkan. “Karena kita tahu, secara politik, Trans Sumatera wajib hukumnya ada tol,” ujar Legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Sementara negara saat ini hanya mampu memberikan dana sekitar Rp38 triliun sebagai PMN untuk tujuh BUMN, dimana tiga diantaranya merupakan BUMN Karya. Adapun Said bilang pemberian PMN kepada perusahaan-perusahaan pelat merah sesungguhnya untuk menyelesaikan PSN bagian dari *replace* atau upaya cari utang baru untuk menutupi utang sebelumnya. BUMN Karya sendiri memang membutuhkan utang untuk mencari alternatif pembiayaan lantaran proyek-proyek pembangunan daerah wajib dirampungkan.

PEN BUMN Karya untuk Dukung PSN

Pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur, atau yang lebih dikenal dengan BUMN Karya, adalah upaya untuk mengakselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN).



Untuk itu, Said meminta pemberian PMN dapat lebih kredibel, dan transparan. Harapannya, penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat optimal, terutama dalam mendanai proyek pemerintah. Selain itu, lanjutnya, penguatan institusi BUMN melalui prinsip *good corporate governance* juga diharapkan membuat BUMN seperti perusahaan nasional negara tetangga, yaitu Temasek di Singapura, Tiongkok, dan India.

Diketahui, BUMN karya yang mendapat suntikan modal paling besar adalah PT Hutama Karya (Persero). Jumlah PMN yang diberikan mencapai Rp23,85 triliun. Dananya digunakan untuk kelanjutan pembangunan 8 ruas Tol Trans Sumatera. Seperti Pekanbaru - Dumai, Binjai - Langsa, Indralaya - Muara Enim, Kisaran - Indrapura, Kuala Tanjung - Parapat, Penanjung - Bengkulu, Sigli - Banda Aceh, hingga Pangkalan - Pekanbaru.

Sebelumnya Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto berpesan agar perusahaan menggunakan modal tersebut secara efisien dan memastikan kualitas pembangunan jalan tol berjalan baik. "Hutama Karya juga diharapkan mengoptimalkan sumber pembiayaan melalui sinergi BUMN dengan memperhatikan kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan di masa yang akan datang," kata Dito.

Selain itu, BUMN karya lainnya yang mendapatkan PMN ialah PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai Rp1,97 triliun untuk investasi pada jalan tol Solo - Yogya - Kulonprogo, Yogyakarta - Bawen dan SPAM Regional Karian - Serpong. Selain berpesan agar modal dari negara digunakan sebaik-baiknya, Dito juga mengarahkan agar pekerjaan konstruksi Adhi Karya agar memberikan *multiplier effect* pada lapangan pekerjaan, serta manfaat ekonomi dan sosial lainnya.

Lalu BUMN Karya ketiga yang memperoleh PMN ialah PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebanyak Rp3 triliun untuk menyelesaikan ruas jalan tol Kayu



"KAMI SETUJU TERHADAP PMN ITU DIBERIKAN, AKAN TETAPI PERSETUJUAN KAMI ITU SESUNGGUHNYA DALAM KERANGKA PENGUATAN MODAL, EQUITY-NYA BUMN"

Ketua Banggar DPR RI HM Said Abdullah. Foto: Anief/rvi

Agung - Palembang - Betung dan Bogor - Ciawi - Sukabumi.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VI Nevi Zuairina meminta Waskita Karya dapat segera menyelesaikan proyek tersebut karena dinilai akan berdampak positif bagi aktivitas perdagangan maupun bisnis pariwisata bagi masyarakat.

Nevi yang juga Anggota Banggar DPR RI itu turut menekankan, jika ruas-ruas tol ini sudah mulai dimanfaatkan masyarakat, maka tarif yang akan dikenakan dari kedua ruas jalan tol tersebut jangan sampai membebani masyarakat. "Lalu saya minta juga, nantinya tiap-tiap ruas jalan tol ini, dalam membangun rest area yang layak dan representatif. Selain itu sangat penting juga untuk melibatkan UMKM sebagai mitra," ujarnya.

Lebih jauh ia menyebutkan, kemitraan yang menggandeng UMKM, akan memberi kesempatan kepada pelaku dan produsen produk khas daerah untuk menawarkan produknya pada *rest area* jalan tol. Masyarakat yang melintas ruas-ruas tol, tambah Nevi akan dapat dengan mudah mendapatkan produk yang khas dari daerah-daerah sepanjang ruas tol tanpa harus keluar jalan tol. ● ah/es

RUU Larangan Minol : Upaya Lindungi Segenap Bangsa

Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki cita-cita bernegara yang telah disepakati oleh seluruh elemen bangsa. Satu di antaranya Melindungi Segenap Bangsa. Upaya untuk melindungi segenap bangsa ini, tidak hanya bersifat individual melainkan juga sosial-komunal. Karena itu, kehadiran negara menjadi penting di tiap aspek dalam rangka pemenuhan tujuan bernegara tersebut.



Pemenuhan terhadap perlindungan bangsa tersebut pun tidak hanya menyangkut dari sisi moralitas (keagamaan), tetapi juga terkait kesejahteraan (ekonomi). Karena itu, dua aspek ini perlu berjalan beriringan dengan diakomodir dalam tiap pasal per pasal, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang hingga kini redaksi judul tersebut belum disepakati secara bulat bahkan di internal Baleg DPR RI.

Anggota Baleg DPR RI Ibnu Multazam menjelaskan, pembahasan RUU yang sudah diusulkan dan dibahas sejak periode 2009-2014 ini *mandeg* dan belum menemukan kata sepakat dalam pembicaraan Tingkat I antara pemerintah dan DPR RI saat itu. Meskipun demikian, Ketua DPR RI periode 2014-2019 Bambang Soesatyo menegaskan sejumlah RUU yang belum diselesaikan dapat dibahas pada masa periode 2019-2024 (*carry over*) mengingat sudah memiliki landasan hukumnya, baik Naskah Akademik (NA) maupun RUU.

Adapun pada DPR RI periode 2019-2024, RUU Larangan Minol kembali masuk dalam *long-list* RUU yang akan dibahas oleh DPR RI, bahkan masuk dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022. Dalam prioritas prolegnas, RUU ini tetap menjadi RUU usul inisiatif Baleg DPR RI. Sejumlah Anggota Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI pun saat ini giat lakukan serap aspirasi di berbagai daerah untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, baik di Provinsi Maluku, Papua, hingga Bali.

Dari NA yang diterima **Parlementaria** tentang RUU Larangan Minol yang disusun pada 2020 tersebut, dari sisi kesehatan Minol diakui dapat menimbulkan beberapa penyakit, mulai dari Gangguan Mental Organik (GMO),

merusak saraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, dan sebagainya. Dari sisi sosial, pengaruh minol juga dapat mengganggu ketertiban keamanan hingga menjurus tindak pidana kriminal berat.

NOMENKLATUR LARANGAN DAN PENGATURAN

Meskipun demikian, di beberapa daerah tertentu, penggunaan minol lekat dengan ragam budaya dan adat-istiadat yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Minol digunakan sebagai bagian dari upacara dalam ada budaya, kebiasaan turun-temurun, atau bahkan menjadi minuman utama untuk menjaga stamina. Bahkan, minol dalam kaitannya dengan adat tradisional ini dapat menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional di kawasan pariwisata.

Karena terkait dengan sektor pariwisata itulah maka RUU Minol juga dirancang tidak sekadar untuk melindungi aspek kesehatan individual maupun kemaslahatan sosial, tetapi juga untuk melindungi kesejahteraan ekonomi, baik terkait sektor UMKM maupun ekspor-impor minuman keras tersebut.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Parta menjelaskan substansi dari RUU ini adalah juga menyangkut bagaimana membangun perekonomian masyarakat, di antaranya dengan mengatur produksi, penjualan hingga peredaran minol agar sesuai sasaran dan tidak menimbulkan gangguan pada ketertiban masyarakat.

“Adapun masalah mabuknya sebagai akibat karena minol yang disalahgunakan jangan sampai justru dijadikan alasan untuk menutup usaha perajin arak. Arak Bali tak hanya dijadikan sebagai minuman beralkohol tradisional, tetapi juga bagian dari sarana persembahyangan,” jelas Nyoman.

Diketahui, Provinsi Bali kerap menjadikan Arak Bali sebagai minuman tradisional serta sarana persembahyangan. Bali, khususnya

“ADAPUN MASALAH MABUKNYA SEBAGAI AKIBAT KARENA MINOL YANG DISALAHGUNAKAN JANGAN SAMPAI JUSTRU DIJADIKAN ALASAN UNTUK MENUTUP USAHA PERAJIN ARAK. ARAK BALI TAK HANYA DIJADIKAN SEBAGAI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL, TETAPI JUGA BAGIAN DARI SARANA PERSEMPAHYANGAN”

Anggota Baleg DPR RI Nyoman Parta. Foto: Oji/Man



di Kabupaten Karangasem, jamak memiliki tanaman pohon kelapa, lontar, serta enau yang secara turun-temurun dibudidayakan sebagai bahan dasar pembuatan arak Bali tersebut.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPR RI Bukhori Yusuf juga

menjelaskan, meskipun RUU ini tetap memiliki redaksi judul ‘Larangan Minuman Beralkohol’, tetap tidak akan mengganggu terhadap proses perekonomian UMKM Arak Bali. Justru distribusi dan produksi yang dilakukan akan semakin mendapatkan perlindungan, tidak menjadi barang oplosan dan ilegal.

“Misalnya, tentang pemasaran minuman-minuman keras atau Arak lokal itu kan nanti tidak bisa di sembarang tempat, harus berizin, dan hotel misalnya harus yang bintang lima. Sehingga, para penggunanya itu memang harus orang-orang yang sadar akan penggunaannya sehingga tidak membahayakan,” ujar Bukhori saat dihubungi *Parlementaria*.

Di sisi lain, adanya RUU Larangan Minuman Beralkohol ini dinilai juga akan menaikkan aktivitas eksportasi dan menekan importasi minuman beralkohol. Dengan cara memberikan insentif produk olahan minuman alkohol untuk ekspor setinggi mungkin, dan pemberian cukai impor tinggi pula untuk produk importasinya.

“Seperti Maroko yang pernah saya kunjungi, dia memiliki anggur yang sangat bagus. Kalau anggur itu, diekspor dalam bentuk anggur saja sangat mahal cukainya. Tetapi, ketika anggur itu diekspor dalam bentuk minuman beralkohol maka cukainya murah sehingga membatasi konsumsi domestik. Sehingga satu sisi ekonomi itu kita tidak terganggu dan aspek keamanannya kita lebih nyaman,” tambah Bukhori.

Meskipun demikian, Baleg DPR RI menegaskan sejauh ini DPR RI masih menyerap aspirasi untuk penentuan nomenklatur judul yang tepat. Apakah judul tersebut masih tetap gunakan nomenklatur Larangan Minuman Beralkohol, Pengendalian, atau Penanganan tentang Masalah Minol. “Jadi ini yang masih jadi persoalan. Kita semua berharap di periode ini RUU ini bisa selesai. Karena kita semua berkepentingan terhadapnya,” tutup Bukhori. ● rdn/es



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengunjungi lokasi banjir di wilayah Kecamatan Glagah dan Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu (2/3/2022). Puan melihat dari dekat kondisi warga yang terdampak banjir. Foto: IST/Man



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memberi pembekalan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Selasa (1/3/2022). Foto: Oji/Man



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus didampingi pimpinan BKSAP DPR RI meninjau langsung persiapan venue IPU Assembly ke-144 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Senin (21/2/2022). Foto : Bianca/Man



Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel menghadiri Seminar Nasional 'Aspirasi Pahlawan Nasional H.B. Jassin 1917-2000' di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022). Foto: Azka/Man



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto foto bersama usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Parlemen Denmark di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3). Foto: Oji/Man



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri deklarasi BnR Indonesia Foundation, Gedung Creative Center Bogor, Rabu (9/3/2022). Dalam acara tersebut digelar pesta rakyat serta aksi sosial khitanan massal. Foto: Runi/Man



“GARA-GARA TAMBANG, WARGA MERADANG”

Aksi protes warga menentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Trio Kencana di wilayah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (12/2/2022), memakan korban jiwa. Satu orang pengunjung rasa bernama Aldi tewas. Diduga, korban tewas akibat

terkena tembakan aparat saat berusaha membubarkan paksa aksi pemblokiran Jalan Trans Sulawesi di Desa Siney, Kecamatan Tinombo Selatan. Unjuk rasa tersebut berlangsung sejak Sabtu (12/2/2022) pukul 12.00 Wita hingga pukul 24.00 Wita.

Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh memimpin Tim

Kunspek Komisi III DPR RI menggelar dialog dengan warga yang berasal dari Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar, dan Kecamatan Tinombo Selatan terkait unjuk rasa yang berakhir bentrok perihal lahan pertambangan di Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Kamis (17/2). ● Fotografer/Teks : Naefuroji/MAN





Komisi III DPR RI menyempatkan diri meninjau langsung Titik Nol Tugu Khatulistiwa, lokasi dimana aksi unjuk rasa dan pemblokiran jalan trans Sulawesi dilakukan. Komisi III DPR juga melihat langsung Tempat Kejadian Perkara (TKP) terbakarnya (Alm) Erfaldi.
Fotografer: Naefuroji/MAN



Mardani Ali Sera

Anak
Betawi yang
Bermotivasi
Tinggi

Siapa sangka, Politisi yang kerap menggaungkan *Leadership* ini lahir dari keluarga yang memiliki banyak keterbatasan. Orang tuanya tidak bisa membaca, namun sangat tegas jika berkaitan dengan pendidikan.

Mardani Ali Sera, namanya kian mencuat dipenghujung tahun 2018. Dimana, saat itu menjelang tahun politik, ia mengkampanyekan **#2019GantiPresiden**. Sebuah kampanye yang berawal dari statemennya di salah satu acara di stasiun televisi nasional.

Lahir di Jakarta, 9 April 1968, Mardani merupakan putra kedua dari pasangan M. Ali Sera dan Rohati. Meskipun buta huruf, kedua orang tuanya sangat disiplin dan tegas dalam mendidik anak. Tak jarang, Mardani mendapat pukulan dari sang ayah hanya karena tidak sekolah ataupun tidak mengaji.

“Meskipun ibu *ga* bisa baca, kalau anaknya ada yang tidak sekolah, langsung lapor ke bapak dan digebukin sama bapak,” kenang Mardani.

Pernah suatu ketika, Mardani kecil bolos mengaji dikarenakan lebih memilih nonton pertandingan sepakbola antara Indonesia vs Burma. Hal tersebut dilaporkan oleh sang kakak, tak ayal pukulan dari sang ayah pun mendarat di tubuh Mardani. “Bagi bapak, ngaji itu adalah yang nomor satu,” ujar Mardani.

Sedari kecil, Mardani memang dekat dengan lingkungan musholla. Hal ini jualah yang disyukurinya dan membentenginya dari kerasnya lingkungan kecilnya di Galur, Jakarta Pusat.

Awalnya, Mardani bukanlah seorang anak yang berprestasi. Namun, ketika ia duduk di Kelas 4 SDN 08 Petang, Tanah Tinggi, ada salah seorang temannya yang dipanggil ke depan kelas. Ternyata, temannya tersebut meraih juara kelas dan mendapatkan hadiah dari guru. Itulah awal mula Mardani terpacu untuk meningkatkan prestasi.

“Saya bergumam dalam hati, enak juga ya, juara dan dapat hadiah. Nah kelas V, saya masuk tiga besar, kelas 6 juara satu. Menginjak SMP, juga juara satu. Itu yang memotivasi saya agar juara. Padahal sedari awal saya

bukanlah orang yang rajin belajar. Saya lebih ingin dapat hadiahnya, bukan karena nilai besar,” ujar Pimpinan BKSAP DPR RI itu.

Sejak itulah, Mardani selalu juara umum di tempat sekolahnya. Setelah menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 1, Budi Utomo, Jakarta, Mardani meneruskan kuliah di Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada 1992.

Setelah lulus dari UI, Mardani mengajar di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Sambil mengajar, ia juga berkesempatan melanjutkan pendidikan pasca sarjana magister dan doktor di Universiti Teknologi Malaysia.

Mardani memiliki keahlian di bidang teknik mesin yang menjadi fokus pendidikannya sejak S1 hingga S3. Karena itu, ia pernah mendapatkan sejumlah penghargaan di bidang teknik mesin sejak tahun 2002, 2003, dan 2004.

MARDANI DAN KELUARGA

Di penghujung kuliahnya, tepatnya saat sedang menjalankan tugas akhir di semester VIII, Mardani memutuskan untuk menikahi Siti Oniah. Seorang perempuan tamatan Diploma III Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP/UNJ), yang sedang mengajar di salah satu pusat bimbingan belajar di Jakarta.

Perkenalan Mardani dengan Siti Oniah sendiri berawal dari salah satu acara dimana keduanya menjadi salah satu perwakilan dari musholla masing-

masing kampusnya. Disampaikan Mardani, sosok seperti Siti Oniah memang memenuhi beberapa kriteria idamannya yaitu, berasal dari suku Jawa dan harus seorang guru.

“Saya inginnya nikah sama orang Jawa. Karena saya beranggapan orang Jawa itu, makan sama garam pun tidak apa-apa asalkan anak sekolah. Syarat yang kedua, dia harus guru, karena guru itu mengajar. Nah dapatlah Siti Oniah dari IKIP, saya kenal, dia calon guru yang separuh keturunan Jawa Cirebon. Kami kenal, dalam hati saya, kayaknya ini orang *pinter*, ya udah langsung klop,” tuturnya diiringi gelak tawa.

Bersama Siti Oniah, Mardani dikaruniai sembilan orang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ada dua hal yang selalu ditanamkan Mardani kepada sembilan orang anaknya, yakni membaca dan demokratis.

Ada trik yang menarik ketika Mardani menanamkan sifat gemar membaca kepada anak-anaknya. Minimal sebulan sekali, ia mengajak anak-anaknya ke toko buku Gramedia. Bukan untuk membeli buku, di sana, anak-anaknya dibebaskan untuk membaca buku apa saja selama dua jam.

“Saya *bebasin* baca buku selama 2 jam itu, pulangnya saya janjikan beli eskrim. Jika ada yang benar-benar penting, baru saya belikan. Jadinya lucu,



Mardani Ali Sera. Foto: Erman/Man

kadang *didatengin* petugasnya, mereka pindah, baca yang lain lagi, *yaudah nikmatin* aja. Gramedia kan enak, adem, banyak buku, anak-anak nyebar aja,” kenangnya.

Selanjutnya yang ditanamkan Mardani kepada keluarganya adalah sikap dan pikiran yang demokratis. Saking demokratisnya, saat dirinya mengkampanyekan 2019 Ganti Presiden, ada anaknya yang malah mendukung sebaliknya. Baginya, hal tersebut bukanlah masalah, karena setiap tindakan atau sikap, harus ada dasarnya.

“Sedemokrasi itulah keluarga saya. Saya bebaskan asal ada dasar pemikiran mereka. Saya serahkan kepada mereka asalkan mereka itu berfikir, makanya dengan begitu ada dialektika diantara anak-anak saya,” ungkapanya.

PIKUL TANGGUNG JAWAB SEBAGAI WAKIL RAKYAT

Sebagai wakil rakyat, banyak yang beranggapan bahwasanya Mardani adalah sosok yang beruntung. Karena selama tiga periode menjalani tugas sebagai anggota parlemen, dua di antaranya adalah menggantikan rekan satu partainya atau masuk senayan melalui Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Saya sudah tiga periode di Senayan, namun PAW-nya dua kali. Jadi benar-benar terpilihnya itu itu baru sekali 2019. Tahun 2009 tidak terpilih, 2011 masuk (dilantik jadi Anggota DPR). Kemudian 2014 *ga kepilih* lagi, 2017 masuk Senayan lagi. Yang terpilih baru kemarin ini 2019 dapil DKI Jakarta I,” terangnya.

Menjaga amanat rakyat itu adalah yang paling berat. Mardani senantiasa diingatkan oleh Sang Istri untuk menjawab dan menampung setiap keluh-kesah masyarakat, terutama yang diwakilinya. “Bi, kami itu di DPR karena konstituen, jawab semua konstituen baik telepon maupun WA. Kalau ada yang sakit, datang. Kalau ada yang menikah, kunjungi,” tutur Mardani menirukan ucapan istrinya.

Tak jarang, masyarakat menanyakan program kerja untuk konstituen di dapilnya. Mengingat, dirinya ditugaskan di Komisi II DPR RI, setidaknya ia selalu ada untuk membantu masyarakat terkait konflik pertanahan yang memang ranah tugas Komisi II DPR RI. “Saya ambil hikmahnya saja, saya tidak bawa apa-apa. Saya sering turun menyapa konstituen, saya biasanya datang dan main langsung ke rumah tokoh, kader, teman. Saya datang langsung saja, *incognito* namanya, atau datang *on the spot*,” kata Mardani.



Pola komunikasi yang dijalankan Mardani dengan konstituennya sedikit berbeda. Jika Anggota Dewan lainnya sering mengadakan pertemuan atau acara yang mengundang banyak orang, Mardani malah kebalikannya. Ia sangat jarang mengundang masyarakat, karena ia sadar kesibukan sebagai bukan di satu atau dua acara saja. Ia takut Ketika sudah diagendakan sebuah acara, namun tidak bisa menghadiri acara tersebut, tentu akan mengecewakan masyarakat.

“Menurut saya datang langsung itu akan lebih berkesan. Saya tidak pernah ngadain acara, karena saya rasa tidak efektif juga. Kalau berdua, itu bisa bicara dari hati ke hati dan membicarakan sesuatu secara mendalam. Kalau *ngadain* acara, kita biasanya terbatas oleh waktu, itu tidak efektif menurut saya,” terang Mardani.

Ada cerita menarik yang ketika periode awal Mardani menjadi wakil rakyat. Saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekitar tahun 2011-2012 ada wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). PKS yang saat itu adalah koalisi pemerintah, mengintruksikan Mardani untuk



Mardani bersama keluarga. Foto: Doc/Man



menerima keputusan tersebut. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Mardani dengan lantang menolak kenaikan harga BBM.

“(saat itu) Saya menyatakan tujuh alasan tolak kenaikan BBM. Saya sudah takut diomelin partai, tapi ternyata tidak. Di hadapak ketua-ketua fraksi saya menyatakan tujuh alasan menolak kenaikan BBM. Padahal PKS adalah mitra koalisi saat itu,” kenangnya.

MARDANI LEADERSHIP SCHOOL

Bagi Mardani, hidup adalah perjuangan. Pendidikan selalu membiakkan kebaikan. Perjuangan di bidang pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan peradaban. Bersama para pejuang ikhlas yang tekun dan penuh keceriaan, ia mendirikan Mardani Leadership School di kawasan Lubang Buaya, Cipayung Jakarta Timur. Baginya, itu menjaga dan mendidik anak adalah amanah dunia akhirat yang akan dipegangnya dengan teguh.

Sekolah yang didirikan di tanah seluar 1200 meter persegi itu fokus pada *leadership* dan *entrepreneurship*, yang merupakan respons proaktif dalam membangun barisan kebaikan yang

berdaya dan siap berkolaborasi dalam kebaikan. Mardani merasa selama ini para pelajar *dijejelin* banyak pelajaran dan tidak memberikan ruang untuk berekspresi.

“Dengan *core* kurikulum akhlak-kepemimpinan, bakat-*entrepreneurship* ditopang fondasi logika dan literasi kami menyiapkan proses mentoring, *coaching*, *teaching* dan *training* bagi anak-anak kami,” terang politisi yang kerap menggaungkan leadership di berbagai kesempatan itu.

Sekolah ini juga merupakan bukti bahwasanya Mardani bukanlah seorang yang omdo (omong doang). “Ini (Sekolah MLS) adalah kontribusi saya membentuk leadership,” tegasnya. Berhubung Mardani Leadership School adalah sekolah karakter berbasis talenta, maka setiap siswa yang mendaftar di sekolah tersebut dilakukan pemetaan berdasarkan talenta.

“Di Mardani Leadership School, anak-anak adalah subjek. Mereka belajar fotografi, vidoegrapi. Di bidang pertanian mereka diajarkan menanam, mereka *ngerasain gimana* capeknya menanam. Ampun dah! Pegel semua, sakit pinggang. Namun setelah itu,

makannya sangat lahap, nasinya habis terus. Akhirnya mereka *ngerasain* capeknya jadi petani, tentu saja mereka akan lebih menghargai petani. Itu hikmahnya,” sambung Mardani.

Setelah berkontribusi di dunia pendidikan, ia masih memiliki cita-cita untuk mendirikan Mardani Political School, yang merupakan tempat diskusi bagi banyak orang yang dengan mengesampingkan partai dan golongan.

“Saya lebih senang menyebutnya dengan rumah aspirasi. Semua orang bisa berdiskusi di sana, ada partai lain, *kelompok lain. Kami punya konsep island of integrity*. Ayok kita bahas integritas kita, kita bahas masalah bangsa kita bareng-bareng,” ujarnya.

Dewasa ini, forum-forum diskusi seakan mati suri. Padahal dengan diskusi, cara pandang terhadap suatu masalah akan terbuka lebar. “Persepsi itu mendahului aksi, pikiran mendahului tindakan. Namun sekarang, persepsi dan pikiran mati, akhirnya aksi dan tindakannya tidak dilakukan secara mendalam, tidak didesain dan tidak diperhitungkan secara matang,” pungkasnya. ● es

Pertahanan, Intelijen dan Telekomunikasi Harus Kuat

Membidangi sektor pertahanan, intelijen dan telekomunikasi, Komisi I DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) kali ini mendatangi institusi pendidikan kemiliteran dan keintelijen serta perusahaan telekomunikasi nasional guna mendengar aspirasi institusi tersebut.

Di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung, Jawa Barat, Tim Kunker Komisi I DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan jajaran pengurus sekolah tersebut. Dimana, Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon yang bertindak sebagai Ketua Tim mengapresiasi sambutan pihak Seskoad.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana peran Seskoad dalam menyiapkan kader Pemimpin TNI AD masa depan yang handal, profesional, serta adaptif terhadap perubahan,” kata Fadli.

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu mengatakan, kedatangan Komisi I DPR RI ke Seskoad pada kesempatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pertahanan dalam bidang pengawasan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Alimin Abdullah menyampaikan tanggapannya terkait urgensi institusi pendidikan bagi perwira itu. Menurut politisi Fraksi PAN itu, Seskoad adalah lembaga yang penting, sehingga Komisi I DPR RI juga dapat mengambil pandangan terkait beberapa hal.

Selain itu, ia turut mengapresiasi upaya Seskoad yang berinovasi melakukan pembelajaran selama pandemi Covid-19 dengan tetap mengedepan kesehatan dan keselamatan perwira yang tengah melangsungkan pendidikan. Diharapkan Seskoad tetap terus adaptif dan mampu meningkatkan kualitas peserta didiknya dari masa ke masa.

DUKUNG STIN TINGKATKAN PENELITIAN

Dalam kesempatan yang berbeda, Komisi I DPR RI juga mengunjungi Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto memimpin tim tersebut dan mendorong sekolah intelijen itu agar terus meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, utamanya dalam bidang penelitian.



Tim Kunspek Komisi I DPR RI foto bersama dengan jajaran Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, Jawa Barat. Foto: Agung/Prima



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno. Foto: Anne/Prima

“Kunjungan Kami ke STIN bermaksud ingin mendalami sekaligus melakukan pengawasan terhadap beberapa hal, salah satunya implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi terhadap perkembangan dunia intelijen,” ungkap Anton. Ia mengatakan, hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang MD3 (MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD) terkait fungsi pengawasan DPR RI.

Dari penjelasan Sestama BIN Komjen. Pol Bambang Sunarwibowo dan paparan Gubernur STIN Laksamana Muda TNI Ivan Yulivan, Komisi I DPR RI mengapresiasi upaya BIN dan STIN dalam rangka mewujudkan STIN menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional.

“Apa saja upaya tersebut, tentu tidak bisa kami sebutkan di sini. Namun yang pasti kami meyakini bahwa upaya tersebut sangat baik untuk mewujudkan STIN menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional. Hal tersebut tentu harus kita apresiasi,” pungkas politisi Partai Demokrat itu.

DUKUNG PEMANFAATAN DIGITAL DIVIDEND

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah

mengatakan dukungannya pemanfaatan *digital dividend* atau spektrum frekuensi rentang 700 Mhz untuk mengakselerasi layanan telekomunikasi dan konektivitas 4G dan 5G di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah *blank spot*.

Hal itu disampaikan saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan Vice President Network Service Management PT Telkomsel Wilayah

Jabodetabek-Jabar di Tangerang, Banten. Pertemuan tersebut membahas ketersediaan, kapasitas, dan kualitas layanan telekomunikasi Telkomsel, khususnya di wilayah Banten.

“Apa sudah ada koordinasi dengan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) terkait *digital dividend* ini, karena ini yang akan menjadi harapan kita untuk bisa memperluas akses-akses komunikasi untuk daerah Lebak dan Pandeglang (Banten),” tanya legislator dapil Banten I itu.

Rizki menilai, pemanfaatan band 700 Mhz sangat membantu pemerataan pembangunan infrastruktur digital, terutama di kontur wilayah perbukitan yang belum tersentuh sinyal komunikasi atau *blank spot*. Misalnya, daerah Lebak, Banten, yang lokasinya tidak jauh dari ibu kota, namun masih terdapat banyak titik *blank spot*.

Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini Komisi I DPR RI akan membahas revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satunya mengatur frekuensi emas 700 Mhz, yang saat ini dalam proses *Analog Switch Off (ASO)*. Diketahui, migrasi TV Analog ke digital akan selesai pada 2 November 2022. Setelah itu frekuensi 700 Mhz akan dialihkan untuk layanan *broadband*. ● ah,ayu,ann/es



Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Foto: Anne/Prima

MPP Inovasi Pemda Wujudkan Layanan Publik Efisien

Komisi II DPR RI mengunjungi beberapa daerah guna mengawasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Dimana, MPP hadir sebagai inovasi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan bagi masyarakat yang efektif, efisien dan cepat.



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meninjau pelayanan MPP Kabupaten Kulon Progo, DIY. Foto: Rizki/Prima

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung meninjau MPP di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Jadi kita ingin memastikan bahwa walaupun di masa pandemi ini, proses penyelenggaraan pemerintahan itu tetap berlangsung dan kemudian pelayanan publik itu juga tetap bisa terjaga dengan baik,” ungkap Doli di Yogyakarta awal Februari lalu.

Komisi II DPR RI menilai pelayanan publik yang diselenggarakan MPP di Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

Hal ini terlihat dari masyarakat yang dapat mengurus berbagai jenis penyelenggaraan administrasi seperti pembuatan e-KTP, SIM, perpanjangan STNK dan izin usaha bagi UMKM dalam satu atap.

“Kita juga langsung melihat bagaimana orang bisa datang membuat e-KTP, selesai dalam sekian menit. Kemudian orang memperpanjang STNK bisa sekian menit selesai, mengurus izin usaha untuk UMKM juga bisa berlangsung dengan cepat,” ujar Doli.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan pihaknya mengapresiasi kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang diselenggarakan

MPP di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain “Mal Pelayanan Publik sudah kami lihat, bagus sekali ya. Ini mungkin juga nanti perlu jadi contoh di daerah-daerah yang lain,” apresiasi Doli.

Legislator dapil Sumatera Utara III tersebut berharap penyelenggaraan MPP seperti di Kulon Progo dapat dikembangkan di seluruh daerah di tanah air. Ia juga berharap jumlah MPP ke depannya semakin banyak dan tersedia mulai dari tingkat kota hingga kecamatan.

“Pelayanan publik yang seperti ini bisa dikembangkan secara lebih baik di seluruh daerah tanah air, untuk kedepannya tentu harus makin banyak di setiap kota atau bahkan bisa diturunkan di tingkat kecamatan,” tutup Doli.

APRESIASI KEMUDAHAN MPP

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim juga mengapresiasi kehadiran MPP *Smart* Kota Salatiga. Menurutnya, MPP *Smart* memberikan kemudahan bagi masyarakat Salatiga dalam mendapatkan pelayanan publik seperti pengurusan perizinan hingga mengurus administrasi pribadi. Selain itu, kehadiran MPP ini menjadi bagian dari keinginan pemerintah dalam reformasi birokrasi dan memperpendek hierarki perizinan.

“Kami mengapresiasi Kota Salatiga yang cepat membangun MPP. Dengan adanya MPP ini pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan lebih cepat, sehingga masyarakat maupun kemungkinan investor-investor untuk datang, akan mendapatkan kepastian oleh sistem yang terjamin,” jelas Luqman usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR

RI meninjau MPP *Smart* Kota Salatiga, di Salatiga, Jawa Tengah. Komisi II DPR RI diterima langsung oleh Wali Kota Salatiga Yuliyanto.

Politisi Fraksi PKB itu menilai, ada perbedaan signifikan dalam pengurusan izin maupun administrasi, sebelum dan sesudah adanya MPP. Menurutnya, sepanjang persyaratan sudah lengkap, secara umum pengurusan perizinan berusaha sudah sangat cepat. Bahkan dalam hitungan menit sudah bisa selesai. Kendati diakui masih ada sejumlah perizinan yang membutuhkan waktu, misalnya persetujuan pendirian bangunan, karena membutuhkan rekomendasi dari dinas terkait.

“Tapi di luar persetujuan pendirian bangunan, secara umum kita melihat (pelayanan perizinan kepada masyarakat) sudah sangat cepat. Selain sangat cepat, juga bisa diakses dari luar. (Masyarakat) tidak arus datang ke sini (MPP). Masyarakat bisa (mengakses) dari rumahnya masing-masing, mengurus perizinan melalui mekanisme OSS (Online Single Submission) yang diterapkan oleh MPP Salatiga ini,” kata Luqman sembari mendorong kepada instansi vertikal yang belum ada di MPP *Smart* Salatiga untuk segera bergabung.

Selain itu, Luqman mengapresiasi kemudahan aksesibilitas yang diberikan MPP *Smart* Salatiga kepada penyandang disabilitas atau difabel.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat meninjau Graha Pelayanan Publik, Pasuruan, Jawa Timur. Foto: Puntho/Prima

“Saya melihat adanya aksesibilitas bagi kaum penyandang difabel, aksesnya mudah bagi difabel. SOP untuk masyarakat difabel dalam mengakses layanan bisa dipastikan. Kita menyaksikan sendiri, bagaimana jika masyarakat difabel datang, langsung dapat nomor antrian. Ada petugas yang memprioritaskan pelayanan yang lebih khusus. Sehingga bagi masyarakat difabel, sama sekali tidak ada hambatan mengurus perizinan di MPP Kota Salatiga ini,” tandas legislator dapil Jateng VI itu.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK PERLU DITINGKATKAN

Saat pertemuan dengan Wakil Bupati Pasuruan, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Pasuruan kedepannya untuk semakin meningkatkan lagi sosialisasi adanya Graha Pelayanan Publik untuk lebih diketahui keberadaannya oleh masyarakat luas khususnya yang berada di Kabupaten Pasuruan

Selain itu, Junimart juga mengapresiasi Graha Pelayanan Publik Pasuruan yang dinilai telah maksimal dalam aktivitas pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Pasuruan seperti pelayanan cepat berbasis aplikasi teknologi digital e-kios diantaranya gerai layanan ATR/BPN, Bank Jatim hingga Polres Pasuruan yang berada dibawah satu atap Graha Pelayanan Publik.

Saat kunjungan, Junimart bersama Anggota Komisi II DPR RI juga menyempatkan diri mendengarkan aspirasi tenaga honorer yang bekerja di beberapa instansi yang ada di Graha Pelayanan Publik. Terkait hal itu, Junimart mendorong Pemkab Pasuruan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPJK). ● rr,sof,pun/es



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau MPP Smart Kota Salatiga, di Salatiga, Jawa Tengah. Foto: Sofyan/Prima

Pastikan Masyarakat Dapat Hak yang Sama di Mata Hukum

Dalam salah satu Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI melakukan fungsi pengawasannya untuk melihat kinerja aparat kepolisian dalam penanganan sejumlah kasus yang menjadi pembicaraan publik.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam penyelesaian kasus tindakan asusilasi yang terjadi di wilayah Kalsel. Menurutnya, tindakan tegas Polda Kalsel terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan asusila terhadap salah satu Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dinilai sudah tepat.

“Langkah-langkah yang dilakukan Polda Kalsel terhadap oknum polisi berinisial BT itu sudah tepat. Tindakan tegas yang telah dilakukan yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” ucap Pangeran usai memimpin pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalsel, Kepala Kejati Kalsel, Ketua Pengadilan Tinggi Kalsel, dan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, di Mapolda Kalsel, Banjarmasin.

Dengan dilakukannya PTDH, maka oknum polisi berinisial BT sejak hari



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin Tim Kunker Komisi III DPR RI di Kantor Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Foto: Eko/rvl

Sabtu, 29 Januari 2022 statusnya sudah resmi bukan anggota Polri, dan kembali menyandang status warga sipil. Oleh karena itu, Pangeran berharap kepada aparat penegak hukum di Kalsel untuk dapat membantu dan memperhatikan masa depan mahasiswi korban asusila BT.

“Hasil dari pertemuan kali ini nantinya kita (Komisi III DPR RI) akan sampaikan pula kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung,” ujar Pangeran.

JANGAN BENTURKAN TNI-POLRI DENGAN RAKYAT

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil meminta agar semua pihak tidak membenturkan TNI dan Polri dengan rakyat. Menurutnya jika TNI dan Polri sudah berbenturan dengan rakyat, kemana lagi rakyat akan mengadu. Karena hal ini juga akan berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara. Ia meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi yang terbuka kepada institusi yang diharapkan bisa mendukung kegiatan pembangunan.

Demikian diungkapkan Nasir saat di sela-sela mengikuti rapat kerja Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa tersebut guna merespons konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo.

“Saya meminta jangan jadikan TNI dan Polri sebagai ‘pemadam kebakaran’, kasus ini kan sebenarnya tugas pemerintahan sipil yang mengelola pemerintahan, masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan ada kemudian pikiran kita untuk membenturkan (TNI/Polri dengan rakyat). Saya tidak menunjuk hidung siapa, tapi kepada kita semua. Saya meminta kepada pemerintah segera selesaikan hak-hak rakyat dengan mereka yang telah menyerahkan lahannya, karena sampai hari ini belum jelas,” tegas Nasir.

Politisi Fraksi PKS ini meminta



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa saat bertukar cinderamata usai memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI. Foto: Anne/nvl

persoalan di Desa Wadas akibat rencana pembangunan Bendungan Bener ini segera diselesaikan dengan pendekatan psikologis emosional. Karena kalau tidak, akan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, yang ujung-ujungnya nanti TNI dan Polri akan ikut terlibat lagi.

“Memang dalam UU Agraria, jika menyangkut proyek kepentingan nasional, negara berhak mencabut hak tanah masyarakat sesuai dengan aturan. Tapi kita harus ingat, bahwa hak milik itu di samping hak kepemilikan ada kandungan psikologis emosional, hal inilah yang tidak kita sentuh. Mari kita sentuh psikologis emosional warga, yang barangkali hari ini belum bisa menerima bahwa ada kandungan SDA di tempat mereka yang akan diambil. Saya percaya dengan begitu, masyarakat menerima dan mau berpartisipasi untuk pembangunan itu,” imbuh Nasir.

TINDAK TEGAS PELAKU PENEMBAKAN WARGA PARIMO

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menegaskan, siapapun pelaku penembakan saat unjuk rasa menolak pertambangan yang berakhir ricuh

di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, ketika menolak tambang emas PT Trio Kencana hingga menyebabkan salah seorang warga bernama Rifaldi tewas tertembak, harus ditindak tegas.

“Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) juga sudah turun dari Mabes untuk melakukan suatu pemeriksaan baik terhadap senjata-senjata maupun aparat-aparat yang turun pada malam kejadian itu,” jelas legislator dapil Sulawesi Tengah ini

dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan pihak-pihak terkait, di Pantai Mosing, Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan, Sulawesi Tengah.

Sebagaimana diketahui, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dan menggelar pertemuan dengan warga masyarakat di Parimo, Sulteng sebagai upaya mendapatkan keterangan mengenai penembakan yang menewaskan seorang warga saat dilakukan pembubaran paksa aksi pemblokiran jalan poros trans Sulawesi pekan lalu. “Kami meminta keterangan dari bapak-bapak, keterangan yang sebenar-benarnya mereka yang betul-betul mengetahui tapi jangan mengarang,” tandas politisi Fraksi PAN ini.

Agung Alfianto Lamakanca, Warga asal desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan dalam keterangannya menyatakan mendengarkan bunyi tembakan tapi tidak mengetahui dan melihat langsung pelaku penembakan itu.

“Bunyi tembakan yang membuat kami ketakutan yang dimana kami berlarian tidak tahu arah dimana yang jelas kami berlarian, saudara saya Aldi itu jatuh. Kami pikir dia jatuh karena tersangkut (terjegal) kakinya. Pada saat kami lihat bahwa sudah ada luka tembakan di tubuh adinda saya,” papar Agung. ● [jk,opi,oji/es](#)



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin Tim Kunker Komisi III DPR RI di Mapolda Kepri. Foto: Kresno/nvl

Awasi Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Komisi IV dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan ke beberapa daerah. Adapun sektor yang ditinjau diantaranya, sektor pertanian dan perikanan serta sektor kehutanan. Dimana, ketiga sektor tersebut haruslah memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Wakil ketua komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk lebih komprehensif dalam melakukan pendampingan petani Sragen dalam menghadapi permasalahan serangan hama tikus. Kementan juga diminta cepat memberikan solusi serta antisipasi terkait hama tikus yang mengganggu lahan sawah para petani mengingat pemakaian jebakan setrum listrik dilarang karena telah menyebabkan 23

orang meninggal dunia dalam kurun waktu Tahun 2020 hingga 2021.

Hal ini disampaikan Dedi usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau secara langsung lahan sawah milik petani yang menggunakan arus listrik untuk mengatasi hama tikus di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah, baru-baru ini.

“Kami menegaskan pada jajaran Kementerian Pertanian untuk lebih komprehensif dalam melakukan pendampingan para petani. Kalau di

sawah ada hama tikus maka harus cepat penanganannya, kemudian dicari solusinya jangan menunggu orang (petani) pasang setrum (listrik). Penanganan hama tikus dengan menggunakan jaringan listrik yang tidak direkomendasikan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tentu tidak boleh terulang lagi, maka harus ada kesungguhan dari Dirjen Tanaman Pangan untuk mengantisipasi hal tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar tersebut juga menyinggung sedikit persoalan jumlah hingga kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang semakin lama semakin berkurang.

APRESIASI INOVASI BBPI SEMARANG

Di Semarang, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mengapresiasi berbagai teknologi, inovasi, rekayasa, standardisasi dan sertifikasi teknik penangkapan ikan oleh Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang yang dinilai ramah lingkungan.

“Komisi IV DPR RI melihat langsung di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang ini dapat membuat semacam apartemen Ikan sebagai tempat berpijah (berkembang biak) yang merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah,” ujar Anggia usai memimpin tinjauan lapangan. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau sarana dan prasarana BBPI di Semarang, Jawa Tengah

Legislator dapil Jawa Timur VI ini menambahkan bahwa konsep apartemen ikan bertujuan untuk memulihkan ketersediaan (stocks) sumberdaya ikan. Tentunya masih banyak lagi inovasi yang dibuat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke BBPI Semarang.

“Melalui Kunspek ini Komisi IV DPR RI ingin menggali informasi secara utuh dan langsung terkait berbagai teknologi, inovasi, rekayasa, standardisasi dan sertifikasi teknik penangkapan ikan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin pertemuan tim Komisi IV DPR RI di Sragen, Jawa Tengah. Foto: Novel/Man



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat meninjau sarana dan prasarana BBPI di Semarang, Jawa Tengah. Foto: Oji/Man

yang dinilai ramah lingkungan. Serta menyerap aspirasi masyarakat, pegawai dan nelayan yang terkena dampak regulasi/kebijakan pemerintah,” pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

APRESIASI DAS KAWASAN MENOREH

Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kawasan hutan merupakan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan sektor kehutanan dan sektor di luar kehutanan. Oleh karena itu pengawasan kawasan hutan terhadap penanaman dan upaya pelestarian rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) menggunakan tanaman yang produktif yang berada di Kawasan Perbukitan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa di jadikan role model bagi kawasan hutan lainnya.

“Penanaman atau pemeliharaan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai yang merupakan kewajiban dari pemegang izin pertambangan dan penggunaan kawasan hutan yang diberikan oleh kementerian ini bisa

dijadikan role model, bahwa kelestarian rehabilitasi DAS itu bisa menggunakan tanaman yang produktif. Sehingga ke depannya bisa menjadi agroforestri jadi tanaman-tanaman yang produktif,” ujar Djarot saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di

Kawasan Perbukitan Menoreh, Kulon Progo, DIY.

Saat meninjau lokasi rehabilitasi DAS, Djarot menilai tanaman produktifnya cukup bagus, seperti jarak antara pohon rata-rata satu setengah meter. Ke depan rehabilitasi DAS dapat terus dikembangkan sesuai dengan kultur tanaman, terutama tanaman endemik.

“Kami lebih suka tanaman local, tapi yang kualitas super premium, seperti alpukat, nangka, petai, kelengkeng, durian Bawor dan durian Musangking, katanya sudah dicoba (ditanam) cocok. Jadi tolong varietas unggulan kita di masing-masing daerah itu juga menjadi perhatian untuk dikembangkan,” pesan Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu.

Di tempat yang sama, Direktur Konservasi Tanah dan Air KLHK Zainal Arifin menjelaskan, pemilihan bibit buah-buahan bisa sebagai pengganti tanaman yang memiliki karakter membutuhkan lebih banyak air daripada tanaman lainnya karena dikhawatirkan dalam jangka panjang bisa mengganggu neraca hidrologi di Kawasan Perbukitan Menoreh sebagai menara air alami yang menyuplai air tidak hanya di Kulon Progo, melainkan ke Yogyakarta dan Magelang. ● afr,nvl,oji/es



Tim Kunker Komisi IV DPR RI foto bersama usai penanaman pohon di di Kawasan Perbukitan Menoreh, Kulon Progo, DIY. Foto: Ariel/Man

Tinjau Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik guna melaksanakan tugas konstitusi dalam pengawasan pembangunan infrastruktur. Kunjungan tersebut juga sekaligus memberikan masukan dan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Komisi V meninjau secara langsung progres pembangunan stasiun dan rel ganda Rancaekek, Bandung, Jawa Barat, yang nantinya berfungsi sebagai prasarana penunjang mobilitas angkutan penumpang dan barang.

Andi Iwan mengatakan, kereta api saat ini merupakan salah satu sarana

transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat sebagai angkutan umum yang terjangkau dan aman. Oleh karena itu diperlukan dukungan prasarana yang memadai dan peningkatan mutu pelayanan perkeretaapian yang optimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi kereta api.

“Komisi V DPR RI mendukung pembangunan stasiun dan rel ganda Rancaekek dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan

kapasitas lintas, meminimalisir biaya angkutan barang dan distribusi logistik, dan mengurangi beban kepadatan lalu lintas di jalan raya yang dapat berdampak pada meningkatnya produktivitas masyarakat,” kata Andi Iwan di sela-sela peninjauan di Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

Dikatakan politisi Partai Gerindra tersebut, melalui kunjungan kerja spesifik ini, Komisi V DPR RI ingin melihat dan mendengarkan secara langsung progres pembangunan stasiun dan rel ganda Rancaekek, serta menginventarisir permasalahan pada pembangunan ini untuk ditindaklanjuti.

HARAP TERMINAL HARJAMUKTI CIREBON SEGERA DIBUKA

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi berharap



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Rancaekek, Bandung. Foto: SinggihMan



Anggota Kom Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi saat meninjau sarana dan prasarana Terminal Harjamukti di Kota Cirebon, Jawa Barat. Foto:Prima/Man

Terminal Harjamukti di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dapat segera dibuka untuk transportasi masyarakat. Sehingga, hal itu dapat berikan kemudahan, kemurahan, dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik untuk mobilitas sehari-hari.

“Karena itu, Komisi VI berharap terminal ini segera dibuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Arwani saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau sarana dan prasarana Terminal Harjamukti di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Diketahui, revitalisasi terminal yang memiliki tema besar ‘Membangun Transportasi Modern’ ini dibangun dengan menggunakan dana APBN juga investor swasta melalui konsep Kerjasama Pemerintah Badan-Usaha (KPBU) untuk membangun pusat komersial. Progres revitalisasi Terminal Harjamukti pada tahun 2020 telah dilakukan Pekerjaan Persiapan Struktur Lantai I, Pekerjaan Arsitektur Lantai I, Pekerjaan MEP Lantai I, Pekerjaan Landscape Area Pengendapan Bus dan Pekerjaan Signage dengan pagu sebesar Rp20 miliar.

USUL PEMBENTUKAN PANSUS SENGKETA PELABUHAN BOJONEGARA

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menyatakan sengketa yang berlarut-larut pada proyek pembangunan Pelabuhan Bojonegara dengan PT Nugra Santana Group selama 25 tahun adalah karena status lahan belum *clear and clean*. Hal itu pun turut memberikan

dampak, dimana hingga kini pelabuhan itu belum bisa dioperasionalkan.

Pelabuhan yang secara administratif berada di wilayah 5°54'38.5”S 106°05'29.3”E, Pelabuhan Internasional Bojonegara (PIB) Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten itu telah melalui peletakan batu pertamanya di tahun 2003 oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Namun pada perjalanan kasus sengketanya, PT. Pelindo II mengalami kekalahan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Hal itu menurut Sudewo sangat disayangkan.

Ia menerangkan upaya yang dilakukan Pelindo II dengan meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. “Kalau yang dilakukan oleh Pelindo selama ini hanya meminta pendapat hukum dari Kejaksaan itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, karena pendapat hukum dari Kejaksaan itu tidak bisa menggugurkan putusan Mahkamah Agung,” jelasnya di sela mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan perwakilan PT Pelindo di Cilegon, Banten. ● skr,pdt,srw/es



Anggota Komisi V DPR RI Sudewo (tengah). Foto:Fitri/Man



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal bertukar cendera mata dengan mitra kerja. Foto: Anne/prima

Tingkatkan **Akselerasi Bisnis dan Korporasi**

Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menggelar Kunjungan Spesifik ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Kunspek yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari itu melakukan beberapa agenda diantaranya tinjauan lapangan ke Data Center PT Telkom Indonesia, Tbk Sentul dan Data Center PT Telkom Indonesia, Tbk Tangerang Selatan serta melakukan pertemuan dengan Dirut PT Telkom Indonesia dan jajarannya.

Kunjungan Spesifik dilakukan dalam rangka pembahasan pembangunan *Hyperscale* Data center atau HDC

dalam mendukung pembangunan akselerasi bisnis platform digital dan korporasi. Dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, Komisi VI mengatakan penggunaan teknologi digital meningkat sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan hal tersebut, bisnis penyediaan layanan data center juga diperkirakan akan semakin berkembang di masa-masa mendatang.

Untuk itu, Hekal berharap pembangunan data

center mampu meningkatkan kinerja perusahaan, sekaligus berkontribusi pada akselerasi bisnis platform digital dan korporasi dari berbagai sektor. Pertumbuhan data center di Indonesia, lanjut Hekal, diproyeksikan mencapai 23,5 persen per tahun pada periode tahun 2020-2025.

Tingginya potensi bisnis data center di Indonesia ini didukung oleh kondisi demografi Indonesia yang memiliki pasar internet dan pengguna *smartphone* aktif terbesar di Asia Tenggara. Indonesia bahkan diperkirakan akan menjadi *the next hub* bisnis data center di Asia, setelah Singapura dan Hongkong.

"Melihat potensi bisnis pusat data yang sangat besar tersebut serta sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan terdepan di bisnis digital telco, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. turut serta dalam menangkap peluang bisnis data center tersebut termasuk melaksanakan investasi pada pembangunan pusat data Telkom HDC," ungkap Hekal.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, terkait dengan investasi data center oleh PT Telkom Indonesia, pada kunjungan kerja spesifik ini, Komisi VI DPR RI ingin mendengar secara langsung terkait progres pembangunan HDC. "Termasuk beberapa aspek teknis terkait antara lain kapasitas data center, *timeline*, indikator kelayakan investasi, strategi inovasi, dampak bagi kinerja perusahaan serta tantangan atau permasalahan yang dihadapi di lapangan," jelas Hekal.

DUKUNG BISNIS 'DATA CENTER' TELKOM INDONESIA

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang memimpin Tim Kunspek ke Tangsel menyampaikan apresiasi kepada Telkom Indonesia yang telah bertransformasi menjadi Digital Telco Company, dimana salah satu domain bisnis utamanya adalah untuk menyiapkan ekspansi bisnis di bidang data center.

Demer, sapaan akrabnya itu menambahkan, kehadiran HDC yang menjadi salah satu pusat data berkapasitas terbesar di Indonesia sejalan sejalan dengan program pemerintah mewujudkan "*Making Indonesia 4.0*" Apalagi, potensi pasar data center di Indonesia sangat menarik bagi investasi, sehingga harus dimulai dari sekarang untuk memanfaatkan secara maksimal pertumbuhan pasar data center.

"Kesempatan itu dimiliki Indonesia, karena pemakaian listrik yang sangat besar. Sementara kita banyak *resources* EBT, dari panas bumi, air, matahari. Indonesia menjadi salah satu tempat berkembangnya bisnis data center disamping kita berada penduduk cukup besar di Indonesia ini, kita tahu pengguna *smartphone* paling besar di Asia adalah Indonesia," ungkap Demer usai peninjauan Data Center Telkom Serpong dan Telkom HyperScale Data Center, baru-baru ini.

Structure Research memproyeksikan pertumbuhan data center di Indonesia akan mencapai 23,5 persen per tahun pada periode tahun 2020-2025. Pada tahun 2025, market size data center di Indonesia diperkirakan akan mencapai

618,6 juta dollar Amerika Serikat. Bahkan tak menutup kemungkinan, Indonesia bisa menjadi *the next hub* bisnis data center di Asia setelah Singapura dan Hongkong." Karena itu, jangan sampai kita ketinggalan, data center yang diprakarsai oleh telkomsel ini sekarang pemainnya lumayan banyak. Saya menghimbau juga perusahaan – perusahaan dalam negeri menggunakan data center Telkom," lanjut Demer.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menuturkan, diperlukan kebijakan afirmatif untuk mendorong pemanfaatan data center Telkom untuk perusahaan nasional dan BUMN dalam rangka memastikan kedaulatan data. Tak hanya itu, kedepannya diharapkan pelaku usaha asing, khususnya layanan *Over - The - Top* (OTT) dapat menempatkan datanya di Indonesia.

"Kita akan dorong kebijakan dari segi aturan - aturan sehingga Telkom menjadi Hub atau pusat data center di Indonesia. Sekarang *market* 40 persen saya harap ke depannya lebih dari 40 persen. Sebab, kita sudah mempunyai infrastruktur yang lebih, dari *backbone fiber optic* dan sebaran dari data center itu juga," tandas legislator dapil Bali itu. ● [ann,rnm/es](#)



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Ria/prima

Distribusi Gas Terkendala Infrastruktur

Komoditi gas bumi memberi kontribusi cukup besar bagi perekonomian nasional. Kebutuhan masyarakat terutama rumah tangga merupakan tantangan bagi pelaku bisnis gas di Indonesia, karena kebutuhannya terus meningkat. Namun, di sisi lain, distribusi gas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk rumah tangga dan bisnis masih menghadapi kendala infrastruktur berupa pemasangan pipa gas yang belum terpasang di seluruh wilayah.

“Kegiatan distribusi gas bumi memiliki keterbatasan infrastruktur pada pipa gas, sehingga pemanfaatannya belum secara maksimal dapat dinikmati di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kerja sama dengan perusahaan seperti perusahaan milik negara maupun pihak swasta. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan kebutuhan konsumen,” tutur Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno saat memimpin pertemuan

Komisi VII dengan direksi PT PGN di Medan, Sumatera Utara, baru baru ini.

PT PGN di Sumatera sendiri sedang mengejar target pemasangan 1 juta sambungan pipa untuk rumah tangga. Eddy melihat, PGN merupakan perusahaan nasional Indonesia terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi. PGN membeli gas bumi dari beberapa produsen yang telah melakukan kerja sama, lalu dilakukan penyaluran ke pengguna gas bumi, yaitu masyarakat.

Namun, PGN masih memasarkan energi gas bumi ke berbagai ukuran pasar dan komunitas. Untuk itu, tantangan yang dihadapi PGN adalah menyediakan infrastruktur untuk menyediakan gas dengan mengantisipasi pasar yang terus bertumbuh. “Pengalaman PGN selama beberapa dekade terakhir memberikan pembelajaran bahwa pengembangan jaringan perlu direncanakan secara tepat, sehingga dapat mencapai tahapan yang optimal,” tutupnya.

DUKUNG PENGEMBANGAN KIM

Wakil Ketua Komisi VII Dony Maryadi Oekon mengatakan pertumbuhan kawasan industri memberikan efek ganda yang luas bagi ekonomi nasional. Menurutnya, dengan adanya investasi masuk atau beroperasinya industri akan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja loker dan penerimaan devisa dari ekspor.

Untuk itu, Dony mendukung upaya mengembangkan dan perbaikan Kawasan Industri Medan (KIM) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komposisi saham Pemerintah Indonesia (pusat) 60 persen, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 30 persen, serta Pemerintah Kota Medan 10 persen ini, agar tidak kalah dan mampu bersaing dengan kawasan industri milik swasta.

“Kalau kita lihat KIM ini adalah termasuk kawasan industri awal milik BUMN dan sudah termanfaatkan kurang lebih sekitar 80 persen. Hanya memang yang harus kita dukung adalah pengembangan-pengembangan selanjutnya,” kata Dony.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, kawasan-kawasan industri



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat pertemuan dengan direksi PT PGN di Medan, Sumatera Utara. Foto: Husen/Man



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon. Foto: Devi/Man

swasta sudah mulai dengan konsep 4.0, oleh karenanya kawasan industri milik negara juga harus mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti perkembangan jaman. Selain itu, ia berharap ada pemanfaatan yang lebih maksimal dari sisi bisnis di KIM.

“Saya berharap ada industri-industri baru dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di situ bisa menjadi bapak asuh untuk industri kecil yang berkembang. Jadi mereka membina industri kecil dan kebutuhan yang menunjang industri mereka supaya mereka juga menjadi besar. Jangan dikuasai oleh industri besar itu sendiri, maka tidak akan berkembang,” pungkasnya.

TINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI ALUMINIUM

Indonesia memiliki sumber bauksit sebagai raw material aluminium yang cukup besar, bahkan merupakan peringkat keenam terbesar di dunia untuk pemilik cadangan bauksit. Namun di sisi lain, sumber daya bauksit tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan hingga saat ini Indonesia masih mengimpor aluminium setiap tahunnya.

Melihat hal tersebut, Komisi VII DPR RI melalui kunjungan kerja spesifik ke PT Indonesia Asahan Aluminium

(Persero) mendorong PT Inalum (Persero) sebagai salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri peleburan aluminium, untuk dapat menaikkan kapasitas produksinya hingga nantinya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri.

Anggota Komisi VII Lamhot Sinaga mengatakan bahwa Komisi VII mendorong sinergi antara PT Inalum (Persero) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Persero dalam hal penyediaan sumber daya listrik guna memenuhi kebutuhan daya listrik yang dapat menunjang peningkatan kapasitas produksi PT Inalum.

“Mereka (PT Inalum) sekarang ada kebutuhan daya listrik yang sangat dibutuhkan untuk menaikkan kapasitas produksi mereka dari 250.000 ton ke 500.000, kita mendorong agar ada sinergi antara Inalum dengan PLN di Asahan 1 dan Asahan 3,” ujarnya.

Lamhot menambahkan, peningkatan kapasitas produksi tersebut bertujuan untuk mengurangi angka impor aluminium dari luar negeri. “Dengan mengurangi angka importasi ini tentunya ini akan menambah devisa kita ya tentu nanti ini adalah sebuah kontribusi yang sangat baik untuk kita perjuangkan,” imbuh legislator dapil Sumatera Utara II tersebut.

Selain itu, menurut Lamhot, hilirisasi produk aluminium saat ini dinilai sudah cukup bagus, meski sebagian besar bahan aluminium masih bergantung pada impor. Untuk itu, pemanfaatan bauksit sebagai bahan mentah dari aluminium yang merupakan salah satu sumber daya dengan cadangan yang besar yang dimiliki Indonesia perlu ditingkatkan. ●mh,dep,bia/es



Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau langsung alur produksi aluminium di PT Inalum (Persero) di Batu Bara, Sumut. Foto: Bianca/Man

Tinjau Persoalan Program Bansos dan Kinerja Kanwil Kemenag



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII di Kantor Wali Kota Padang. Foto: Husen/Man

Komisi VIII DPR RI memantau persoalan program bantuan sosial (bansos) di Sumatera Barat dan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Selatan pada awal Februari 2022 lalu.

Memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sumbar, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menilai bansos yang digulirkan pemerintah selama ini masih bermasalah pada data penerima bantuan. Ia menambahkan, persoalan krusial ini selalu jadi perdebatan antara pemerintah dan DPR RI.

“Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih semrawut dan selalu menjadi

perdebatan kita. Kami ingin memastikan PPKS itu selesai dengan baik. Kalau PPKS tidak selesai dengan baik, maka program sosial menjadi sia-sia,” kata Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI menggelar pertemuan dengan Wali Kota Padang, di Padang, baru-baru ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, banyak bantuan sosial sama sekali tidak ada penerimanya, karena persoalan data yang salah. Ada yang sudah meninggal, pindah rumah, dan penerima yang

tidak ditemukan. Bila saja ada satu juta orang atau keluarga se-Indonesia, lanjutnya, dikali empat juta program yang dikururkan dalam satu tahun, bisa menjadi Rp40 triliun bantuan uang yang sia-sia lantaran datanya semrawut.

“Sementara di pihak lain, ada masyarakat yang riil menuntut ke wali kota dengan kondisinya yang tidak layak, tapi tidak masuk menjadi penerima bantuan sosial,” tutur Marwan.

Pihaknya menyampaikan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pondasi kesejahteraan sosial juga perlu diperbaiki. DTKS itu meliputi PPKS, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Terkait pemberangkatan jemaah haji, Marwan menjelaskan, pihaknya sudah membentuk Panja Haji untuk kembali

menelusuri persoalan haji di masa pandemi ini. Mengingat selama dua tahun berturut-turut ibadah haji tertunda. Tahun ini rencananya ibadah haji dibuka kembali. Namun, Pemerintah Arab Saudi dikabarkan hanya memberi setengah kuota jemaah haji dari 220 ribu kuota yang dimiliki Indonesia. Di sinilah akan muncul kerumitan baru, siapa saja jemaah yang bisa berhaji tahun ini.

“Komisi VIII sudah membentuk Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji. Dua tahun berturut-turut tidak ada ibadah haji. Antrian jadi semakin panjang. Jemaah kita semakin resah. Jemaah kita rata-rata umurnya sudah tua. Kalau ditunda setahun lagi, apakah masih hidup? Andaikan nanti Pemerintah Arab Saudi memberi kuota kita setengahnya dari 220 ribu menjadi hanya 100 ribu saja, maka akan muncul kerumitan baru, siapa yang akan dipastikan berangkat,” ungkap Marwan.

Lobi dengan Pemerintah Arab Saudi jadi keniscayaan untuk dilakukan Pemerintah Indonesia dan DPR. Harapannya, kuota tidak dikurangi. Bila kuota didasarkan pada presentasi wilayah, bisa jadi ada provinsi yang tidak kebagian jatah haji. Untuk itu Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohaj) harus diperbaiki. Namun, lanjut legislator dapil Sumatera

Utara II itu, pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi ini akan dikenai biaya tambahan berupa PCR tujuh kali dan karantina sebelum masuk Mekkah dan Madinah.

PANTAU PELAYANAN KANWIL KEMENAG SULSEL

Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka memantau pelayanan di Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan. Diah mengatakan, sejumlah hal yang dipantau di antaranya peningkatan mutu pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA), pelayanan haji dan umrah terpadu, moderasi umat beragama, serta pengembangan madrasah melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di lingkup Kanwil Kemenag Sulsel.

“Kita ingin memantau program-program kementerian, yang sudah berjalan di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan,” imbuh Diah usai memimpin pertemuan dengan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zain, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid, Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan Khaeroni, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

se-Sulsel, di Madrasah Aliyah Negeri-Program Keagamaan (MAN 3-PK) Makassar, Sulsel.

Terkait pemberangkatan haji, Diah memaparkan Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama beserta jajaran sudah mulai membahas persiapan haji. Menteri Agama RI pun sudah bertandang ke Arab Saudi, guna berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi, termasuk kementerian yang menangani haji. “InsyaAllah haji dapat berjalan. Bagaimana respon Arab Saudi terhadap haji lebih positif. Kita berharap haji bisa diselenggarakan tahun ini,” harap politisi PDI-Perjuangan itu.

Terkait pelaksanaan haji di masa pandemi ini, Diah berpesan kepada jemaah haji untuk menjaga diri masing-masing dan menjaga jemaah lain. “Artinya saling membantu, karena ada yang usia tua, muda, ada yang kuat, lemah, kami berharap jemaah Indonesia bisa saling membantu, bekerjasama, saling menguatkan, saling menjaga, sehingga ibadah haji dapat berjalan dengan baik, jemaah kita juga lancar. Karena kan nanti saling membantu itu perlu. Karena nanti banyak aplikasi yang sifatnya digital. Otomatis nanti butuh bantuan,” pesannya.

Terkait pengembangan madrasah, dengan banyaknya jumlah madrasah di Sulsel, sehingga membutuhkan banyak keberpihakan dari pemerintah. Namun Diah melihat kondisi tidak hanya di Sulsel, namun juga di daerah lain. “Pengembangan madrasah baik negeri dan swasta, dan juga peningkatan jumlah penduduk yang membuat pertumbuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan, salah satunya pendidikan Islam itu meningkat. Dan persoalan ini kita tangkap di daerah, sehingga ini harus jadi pembicaraan dan pembahasan khusus (Komisi VIII DPR RI) dengan Kemenag,” kata legislator dapil Jawa Barat III tersebut. ● mh,sf/es



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka foto bersama dengan Kakanwil Kemenag Sulsel, di Makassar. Foto: Sofyan/Man

Serap Masukan Terkait RUU POM

Panja Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) perguruan tinggi untuk menyerap aspirasi dari para akademisi di bidang kesehatan terkait RUU POM yang sedang menjadi konsentrasi di Komisi IX DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, saat memimpin kunjungan ke Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang menjelaskan, kemajuan dan perkembangan teknologi modern telah membawa perubahan-perubahan yang sangat cepat dan bermakna pada industri makanan dan farmasi, termasuk didalamnya obat, bahan obat, kosmetik, obat tradisional, dan makanan. Namun, dalam hal jaminan kepastian mutu dan keamanannya, belum memenuhi persyaratan keamanan, mutu serta manfaat dan khasiat. Hal itu terjadi pada produk yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

“Permasalahan-permasalahan tersebut timbul sebagai akibat dari belum optimalnya pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat dari risiko produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu menjadi sangat penting untuk dilakukan,” tegas Charles.

Secara yuridis, tutur Charles, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pengawasan obat dan makanan. Menurutnya, Undang-Undang yang sudah ada saat ini seperti UU tentang Psikitropika, UU tentang Perlindungan Konsumen dan UU tentang Kesehatan, belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat

untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi.

“Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan sangat diperlukan untuk



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, saat memimpin pertemuan secara virtual. Foto: eki/prima

mengatur pengawasan obat dan makanan secara khusus sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha,” tandas Charles Honoris.

Dalam sesi diskusi, pihak UPH memberikan masukan konkret mengenai RUU POM ini. Salah satunya yang disampaikan Ketua Jurusan Teknologi Pangan, Donald R Pokatong

terkait sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif.

“Perlu adanya pelatihan bersertifikasi untuk menghasilkan *qualified food inspector* dan ditugaskan sampai ke unit kerja POM tingkat kecamatan untuk memantau dan menginspeksi pelaksanaan/ implementasi praktik-praktik yang baik dalam proses pengolahan pangan, dan penjaminan mutu pangan (*food quality assurance*) untuk produk pangan olahan, agar bisa tercapai perlindungan maksimal bagi masyarakat,” papar Donald.

PERKUAT POSISI BPOM

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan RUU POM diharapkan dapat memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selama ini,

menurutnya, BPOM dalam menjalankan tugasnya, salah satunya melakukan pengawasan terhadap edar obat dan makanan, tanpa dilandasi payung hukum yang kuat.

“RUU ini poinnya banyak sekali, tapi intinya (untuk) memperkuat BPOM, karena selama ini mereka tanggung jawabnya luar biasa menjaga keseimbangan pangan dan kesehatan masyarakat. Namun payung hukumnya



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Taufan/Prima

belum kuat, jadi RUU itu untuk memberi payung hukum,” katanya saat memimpin pertemuan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan sivitas akademika Universitas Indonesia secara virtual, baru-baru ini.

Selain itu, adanya RUU tersebut juga memberi kelonggaran bagi Badan POM untuk melakukan tindakan dalam pengawasannya. Pasalnya, lanjut legislator dapil Jawa Timur III ini, selama ini badan tersebut hanya bisa melakukan pengawasan tanpa tindakan bagi pengedar obat dan makanan ilegal.

Anggota Komisi IX lainnya Putih Sari mengatakan, dengan adanya RUU POM ini diharapkan mampu membuat masyarakat cerdas sebagai konsumen untuk obat dan makanan yang aman dan bermutu. Serta tak ketinggalan ialah sisi penegakan hukum kejahatan obat dan makanan yang menimbulkan efek jera.

PERLU EVALUASI PENETAPAN UMK

Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat Kunspek Komisi IX melakukan evaluasi terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pemilihan Kabupaten Karawang sebagai sasaran kunspek tersebut karena Karawang menjadi salah satu daerah dengan

pertumbuhan industri yang cukup signifikan.

Dalam evaluasinya, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai bahwa UMK Kabupaten Karawang tahun 2022 sudah sesuai dengan perhitungan yang ada. Menurut Edy, perhitungan tentang UMK sudah diatur di dalam undang-undang cipta kerja, sehingga semua harus mengikuti aturan dalam undang-undang tersebut.

Edy menyoroti belum semua perusahaan di Kabupaten Karawang, menerapkan struktur dan skala upah (SSU). Padahal menurutnya, SSU merupakan kewajiban bagi para pengusaha dan merupakan hal yang penting menyangkut kesejahteraan pekerja. Karena itu, menurut Edy, harus ada advokasi dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Karawang, pengawas tenaga kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Asosiasi Pekerja serta aparat penegak hukum untuk dapat mengawasi pengusaha-pengusaha yang tidak menerapkan atau tidak memiliki struktur skala upah.

Lebih lanjut Edy mengapresiasi Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK Kabupaten/Kota di Jabar tahun 2022 yang mengatur tentang struktur dan skala upah sebagai bentuk dari proteksi pemda. Legislator dapil Jawa Tengah III itu menekankan bahwa Keputusan Gubernur tersebut harus didorong dan didukung oleh bupati-bupati di Jawa Barat.

Untuk itu, Eddy meminta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah perlu dievaluasi kembali. Menurutnya, Perda tersebut justru malah bertabrakan dengan Perda Gubernur Jawa Barat. • tn,eki,bia/es



Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto di Kantor Bupati Karawang, Jabar. Foto: Bianca/Man

Evaluasi PTM dan Soroti Penerimaan PPPK

Komisi X DPR RI menurunkan Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke tiga daerah di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Depok serta Kabupaten Bandung Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat.



Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda bertukar cendera mata dengan Bupati Bandung. Foto: Tari/Man

Tim Kunker Komisi X di Soreang, Kabupaten Bandung yang menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pembelajaran tatap Muka (PTM) 100 persen. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyampaikan bahwa pelaksanaan PTM sudah mencapai 50 persen dan dilaksanakan secara bergiliran. Sementara vaksinasi bagi peserta didik usia 6-11 tahun sudah mencapai 80,94 persen.

“Kita apresiasi karena sampai hari ini

belum mendapatkan kabar ada kluster di sekolah. Ini merupakan prestasi tersendiri bagi kabupaten Bandung sebagai penyangga dari ibu kota provinsi,” kata Huda usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI dengan Bupati Bandung beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati Bandung, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Komisi X DPR RI juga mengonfirmasi terkait pembiayaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di

Kabupaten Bandung, apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Berdasarkan kebijakan pemerintah, skema gaji PPPK sepenuhnya akan ditanggung penuh oleh APBN, melalui tambahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Namun faktanya DAU Kabupaten Bandung tidak bertambah, sehingga Pemkab Bandung tidak berani mengusulkan formasi maksimal untuk guru PPPK.

Huda mendapati informasi belum ada penambahan DAU Kabupaten Bandung. “Ini kelihatan kenapa bupati masih belum berani mengusulkan formasi maksimal untuk guru honorer menjadi pegawai PPPK, karena faktanya DAU-nya tidak naik, padahal pemerintah pusat, Kemendikbudristek merasa DAU-nya sudah ditambahkan. Nah, ini akan menjadi PR bagi kami dan akan kami sampaikan dalam rapat kerja dengan Kemendikbudristek,” komitmen politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

MINTA EVALUASI PTM 100 PERSEN

Pemerintah kembali mengumumkan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia. Data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Jumat (28/1/2022) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 9.905 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Saat meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Negeri 1 Depok dan SD Negeri 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti pun menyikapi hal itu dengan meminta kepada Pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

“Mungkin menurunkan (PTM) menjadi 50 persen, tidak perlu memaksakan untuk 100 persen. Perlu dievaluasi PTM 100 persen ini,” kata Agustina usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI.

Menurut Agustina, pelaksanaan PTM 100 persen perlu dilihat pada

tingkat penyebaran kasus Covid-19 di suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu memaksakan agar PTM dilaksanakan secara 100 persen. Karena keselamatan para murid dan guru perlu menjadi prioritas. “Jangan sampai harus mengorbankan keselamatan murid dan guru,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Selain itu, kata Agustina, Komisi X DPR juga sudah mendengar penjelasan dari Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bahwa sudah ada 18 sekolah yang melakukan *lockdown* karena adanya murid dan guru yang terpapar Covid-19, baik itu dari SD, SMP dan SMA. Oleh karena itu, Agustina memastikan Komisi X DPR RI akan meminta adanya evaluasi pada Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

SOROTI AFIRMASI KEPADA PENYANDANG DISABILITAS

Di Kabupaten Bandung Barat, Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari menyoroti afirmasi kepada penyandang disabilitas dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, hal tersebut menjadi



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau PTM 100 persen di SMP Negeri 1 Depok. Foto: Rizki/Man

suatu perhatian penting. Untuk itu ia mempertanyakan apakah konteks disabilitas tersebut yang justru mencegah penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan di dalam menjadi PPPK.

“Ini menjadi suatu catatan penting dalam konteks pendidikan, pengangkatan PPPK, menjadi guru atau

apapun para penyandang disabilitas berkewarganegaraan Republik Indonesia memiliki hak yang sama dan setara untuk bisa mengakses kehidupan mereka dan mendapatkan keadilan bagi mereka untuk bisa menjadi manusia yang mandiri dan sejahtera,” tegas Dessy.

Sebagai informasi, pada pelaksanaan rekrutmen guru PPPK bagi penyandang disabilitas masih menghadapi kendala terkait dengan teknis yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Diketahui, proses seleksi PPPK bagi guru penyandang disabilitas diberlakukan sama dengan guru non-disabilitas.

“Jadi, yang paling utama kami berharap sekali agar kendala pengangkatan guru-guru honorer menjadi PPPK ini bisa terselesaikan dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang jelas. Tidak hanya dalam tataran kebijakan, tapi dalam tataran penganggaran juga dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, kabupaten dan kota,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV tersebut. ● hnm,qq,mri/es



Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari (tengah) saat mengikuti pertemuan dengan jajaran Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Foto: Hanum/Man

Dorong Partisipasi Publik dalam Sosialisasi Prolegnas

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 40 RUU dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024 ditetapkan sebanyak 254 RUU. Baleg DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah yaitu Sulawesi Selatan, Riau dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg ke Makassar mengatakan melalui forum sosialisasi ini masyarakat diharapkan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut dapat memberikan masukan-masukan,” urai Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan masyarakat perlu mengetahui rencana pembentukan undang-undang yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi Undang-Undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Awiek mendorong terjalinnya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah

terkait proses pembentukan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. “Kami juga ingin menyerap aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan, aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya masyarakat Riau menjadi kekuatan untuk dapat menyegerakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Tentu mereka banyak masukan dan harapan. Tadi kita sudah diskusi panjang. Banyak hal. Itu menjadi catatan kami. Itu akan kami prioritaskan untuk segera kami lanjutkan dan kami tindaklanjuti dalam bentuk pengesahan undang undang tersebut,” ujar Wahid di sela-sela memimpin kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Pekanbaru, Riau.

Sebelumnya, Baleg DPR RI melakukan pertemuan sosialisasi mengenai Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan tahun 2020-2024 di Pekanbaru, Riau. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi serta menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dalam meminta masukan terhadap RUU yang telah ditetapkan oleh DPR RI bersama pemerintah.

Wahid menjelaskan, bahwa dalam penyampaian aspirasi seringkali ada semacam *bottle neck* atau sumbatan sumbatan selama ini, sehingga belum



Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. Foto: Oji/Man



Wakil Ketua Baleg DPR RI Abdul Wahid saat Kunjungan Kerja di Pekanbaru. Foto: Hira/Man

tersalurkan dengan baik. Sehingga kehadiran Baleg di sini untuk membuka saluran yang tersumbat tersebut. “Ini (diskusi dan serap aspirasi) menjadi pengayaan kami dalam rancangan undang-undang ke depan,” terangnya.

Di akhir, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu selaku pimpinan Baleg juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Riau sebagai pihak yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan serap aspirasi tersebut. “Semoga komunikasi terus terjalin dan memberikan manfaat kepada semua *stakeholder*,” pungkasnya

Di Yogyakarta, Anggota Baleg DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, dalam forum sosialisasi itu pihaknya memperoleh banyak masukan sekaligus mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi undang-undang.

“Dari forum ini kami kami bisa mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa. Karena memang yang diundang dari Pemerintah DIY ini memang mereka yang berkompeten terkait dengan perencanaan peraturan penyusunan peraturan perundangan maupun karena pelaksanaan undang-undang di dalam kesehariannya,” jelas Esti usai sosialisasi Baleg DPR RI

dengan Pemerintah Daerah Provinsi DIY, di Yogyakarta.

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu berharap semua masukan yang diterima Baleg DPR RI terkait bagaimana dengan partisipasi publik, sudah diupayakan DPR RI dalam setiap pembahasan RUU. “Supaya publik bisa terus bisa memberikan masukan yang memberikan kemanfaatan pada rancangan seluruh rancangan undang-undang,” kata legislator dapil DIY itu.

Adapun dari pertemuan itu, ia menemukan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui bagaimana

cara menyampaikan pendapatnya terkait dengan masukan dalam pembahasan RUU. Padahal saat ini masyarakat tetap bisa memberikan masukan terhadap perancangan undang-undang melalui saluran digital.

Ia menegaskan beberapa masukan lain yang pihaknya harapkan nanti akan ditindaklanjuti oleh DPR RI di bidang legislasi. “Supaya undang-undang yang kami hasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan sesuai dengan metode-metode yang diharapkan masyarakat juga,” pungkas Esti. ● [oji,ah,hal/es](#)



Anggota Baleg DPR RI MY Esti Wijayati bertukar cendera mata dengan Pemda DIY. Foto: Agung/Man

Konflik Wadas, Komisi III Beri Rekomendasi

Konsekuensi pembangunan selalu berdampak adanya pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Dalam konteks inilah perlu kepandaian lebih mengatasi persoalan, sekaligus juga membuat rakyat tidak memiliki prasangka buruk kepada pemerintah.

Tak sedikit, efek pembangunan yang menyisakan luka bagi warga yang terdampak. Terbaru adalah penolakan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menolak wilayahnya dijadikan pertambangan terbuka batuan andesit untuk pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo.

Warga yang merasa dirugikan jelas memiliki alasan kuat menolak, karena sebelumnya kawasan Wadas bukanlah untuk areal pertambangan mengingat di sana juga merupakan penyangga untuk kawasan Menoreh. Mereka khawatir penambangan batuan tersebut akan menimbulkan persoalan serius seperti longsor yang bisa saja menghilangkan nyawa mereka. Bahkan mereka menuding para penambang

sudah melanggar aturan pemerintah dengan mengubah tata ruang.

Atas kasus ini Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang bersangkutan. Hasil dari kunjungan tersebut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan tujuh rekomendasi yang dihasilkan Komisi III DPR RI terkait konflik yang terjadi di Desa Wadas yang sempat menyita perhatian khalayak luas. Selain itu terdapat 13 item catatan lapangan yang didapat Komisi III DPR RI.

Tujuh rekomendasi itu antara lain, pertama, Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,



Ketua Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa berdialog dengan sejumlah warga yang pro dan kontra maupun dari LBH di Desa Wadas. Foto: JakaMan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) melakukan pendekatan dialogis untuk sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat di lokasi Proyek Strategis Nasional maupun daerah sekitar atau penunjang (baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak).

Khusus terkait rencana pemerintah dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sesuai dengan kemanfaatan dan ketentuan perundang-undangan, mekanisme proses dan pembayaran akibat pengalihan hak atau ganti rugi, rencana pemerintah untuk dapat mendukung kesejahteraan warga pasca pengalihan hak, skema reklamasi atau perbaikan tanah pasca proyek dan lokasi penambangan, dan manfaat dari PSN bagi warga setempat.

Kedua, Komisi III DPR RI merekomendasikan agar pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah (Gubernur), BPN, dan BBWS melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan kembali lokasi-lokasi sumber batu andesit yang dapat dilakukan pengalihan hak agar sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi risiko protes atau penolakan warga di sekitar PSN.

Ketiga, Komisi III DPR RI meminta Gubernur Jawa Tengah bersama dengan BPN dan BBWS untuk melakukan re-evaluasi terhadap pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener dan penyelesaian proses ganti rugi.

“Komisi III DPR RI meminta peta kebutuhan batu andesit di wilayah Desa Wadas (warga yang setuju),” ungkap Desmond dalam laporannya.

Keempat, Komisi III DPR RI meminta BBWS agar merealisasikan komitmen pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 11 Februari 2022



Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI berdialog bersama warga yang pro-kontra di Desa Wadas. Foto: Jaka/Man

untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga atau pihak lain.

Kelima, Komisi III DPR RI meminta agar pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) terhadap seluruh warga (baik yang setuju maupun tidak setuju), serta mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keenam, Komisi III DPR RI meminta agar Pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga masyarakat yang berada di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah setuju untuk mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan menteri. Ketujuh, Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara Pemerintah dengan warga pemilik tanah.

Desmon menilai minimnya komunikasi pemerintah kepada warga terhadap rencana master plan PSN dan tidak adanya kepastian pembayaran tanah, inilah yang menyebabkan terjadinya prahara di Desa Wadas. Temuan itu mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI saat berdialog kepada sejumlah warga yang pro

dan kontra maupun dari LBH di Desa Wadas.

“Parameter persoalan dasarnya adalah kepastian soal pembayaran bagi masyarakat yang sudah setuju tanahnya dijual dan komunikasi yang sampai hari ini belum nyambung secara maksimal tentang persoalan proyek ini, antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak instansi yang terlibat langsung. Harapannya ke depan proyek ini bisa berjalan dengan baik, masyarakat pun puas dan bisa menerima,” jelas Desmond saat konferensi pers bersama Gubernur Jateng dan Kapolda Jateng, di Mapolda Jateng, awal Februari 2022.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, berdasar keterangan di lapangan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) harus menjelaskan kepada warga terkait teknis pengambilan batu andesit yang tidak merusak lingkungan dan jalan masyarakat, karena mereka mengklaim punya teknologinya. “Kepala BBWS bilang untuk mengambil batu andesit punya teknologi yang cukup sehingga tidak merusak lingkungan, mari kita kawal dan buktikan, mereka mengklaim sudah punya peralatan sendiri,” terang Desmond.

Desmond juga mengingatkan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, ke depannya harus memimpin dialog, berdiskusi dan mengevaluasi segala kegiatan-kegiatan agar lebih terukur ke depan. ● *eko/es*

Bahas Persiapan IPU dengan Duarte Pacheco



Delegasi BKSAP melakukan pertemuan dengan Presiden IPU Duarte Pacheco. Foto: Dok BKSAP/Prima

Memperoleh kepercayaan untuk menyelenggarakan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong dan Presiden IPU Duarte Pacheco di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat, Jumat, (18/02).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana, menjelaskan persiapan DPR RI untuk Sidang IPU ke-144 di Bali pada 20-24 Maret 2022 mendatang.

Tidak hanya mengundang para anggota parlemen IPU, politisi Fraksi Partai Demokrat itu menyampaikan generasi muda harus terlibat secara aktif dalam proses politik. Baginya hal ini harus menjadi prioritas setiap negara guna menjamin representasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Di tengah abad digital seperti saat ini, banyak generasi muda

menggunakan sosial media sebagai sarana komunikasi. Ini menjadi peluang upaya edukasi politik serta membangun konektivitas digital ini juga menjadi tantangan bagi para anggota parlemen untuk mampu menjadi *role model* dalam proses demokrasi yang sehat bagi para pemuda,” tutur Putu.

Di sisi lain, BKSAP DPR RI Fadli Zon menyuarakan solidaritas global demi menekan ketimpangan struktural ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, tidak ada satu pun negara di dunia yang kebal oleh Covid-19. Sehingga, solidaritas global dianggap mampu menguatkan setiap negara di dunia untuk bekerja sama

agar segera pulih di segala aspek pasca-pandemi.

“Jika ketimpangan ini tidak ditangani serius, maka akan makin tajam ketimpangan negara maju dan negara berkembang, orang kaya dan orang miskin. Tentu akan semakin menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” tutur Fadli Zon.

Dalam acara yang mengundang lebih dari 200 anggota parlemen dari 70 negara dunia, Fadli Zon menekankan kerja sama dan kolaborasi sebagai prinsip solidaritas global. Pasalnya, ia menilai dampak Covid-19 dirasakan tidak hanya pada aspek kesehatan saja, namun juga lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Covid-19 telah mempersulit upaya pencapaian 17 tujuan dalam SDGs, karena pandemi mempertegas ketimpangan ekonomi di seluruh negara, terutama di negara-negara yang berada dalam situasi konflik maupun perang.

ia menegaskan komitmen DPR RI untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan global melalui berbagai forum multilateral.

Sebagai informasi, Sidang IPU yang dilaksanakan di Markas Besar PBB merupakan forum bagi parlemen seluruh dunia untuk menyampaikan pandangan dan perspektif masing-masing negara terkait menghadapi tantangan global, serta menggali upaya bersama yang dapat didorong untuk mewujudkan pemulihan berkelanjutan. Setiap pandangan yang disampaikan, nantinya, akan menjadi rekomendasi pemerintah dunia yang tergabung dalam organisasi PBB, khususnya pada pembahasan Sidang Umum PBB pada September 2022 ini. ●ts/es

IPU ke-144 Suarakan Urgensi Mitigasi Perubahan Iklim

Penguatan fungsi parlemen dalam membangun kerja sama sekaligus kolaborasi diplomasi parlemen sangat penting dalam mendukung pencegahan dan mitigasi perubahan iklim dunia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berpandangan, parlemen berperan vital untuk mengawal kebijakan-kebijakan negara guna tercapainya *Net Zero Carbon Emissions*.

“Tahun ini menjadi fokus kami di BKSAP DPR RI adalah mengenai perubahan iklim. Sebagaimana kita ketahui bersama, perubahan iklim telah menjadi isu krusial yang penanganannya membutuhkan kerja sama berbagai pihak,” jelas Fadli Zon mengenai Sosialisasi IPU ke-144 di Gedung Andi Hakim Nasution,

Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, pertengahan Februari lalu.

Turut hadir Rektor IPB Arif Satria, Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan Hubungan Alumni Dodik R. Nurrochmat, dan Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis Eva Anggraini.

Isu perubahan iklim dunia harus memperoleh dukungan parlemen baik di tingkat Internasional maupun regional. Oleh sebab itu, DPR RI memperoleh kepercayaan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Forum Parlemen Dunia 144th IPU Assembly dengan tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate

Change’, yang akan diselenggarakan pada 20-24 Maret di Nusa Dua, Bali.

Politisi Partai Gerindra itu juga menegaskan, konferensi tersebut akan memperkuat suara dukungan parlemen dunia. Di mana, juga akan membuka ruang berbagi pengalaman tentang bagaimana parlemen berperan mempercepat *Net Zero Carbon Emissions*. Dirinya juga menyampaikan hal ini jadi bukti komitmen Indonesia terhadap penyelesaian permasalahan perubahan iklim kepada dunia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar P.H. Sitorus menekankan isu perubahan iklim harus jadi salah prioritas program pembangunan pemerintah. Dirinya menerangkan, dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP), yang turut mengatur pajak karbon, dapat membantu Indonesia mencapai target *Nationally Determined Contribution (NDC)*.

“Parlemen berperan strategis memastikan implementasi SDGs. Peran konkret DPR RI terkait isu perubahan iklim, pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target *Nationally Determined Contribution*, serta kesiapan sektor dan kondisi ekonomi,” ucap Sihar.

Politisi Partai PDI-Perjuangan itu menjelaskan parlemen memastikan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bisa dipenuhi di Indonesia, terutama terciptanya *climate justice*. Mewakili rakyat Indonesia, lanjut Sihar, DPR RI mendukung upaya tercapainya penanganan perubahan iklim melalui empat fungsi, mulai dari legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi. ●ts/es



Tim Kunker BKSAP DPR RI bertukar cendera mata dengan Rektor IPB Arif Satria. Foto: Dok BKSAP/Prima



DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)



Diah Pitaloka: Dukung Keterlibatan Pemuda dalam Program Pejuang Muda



Anggota DPR RI Diah Pitaloka. Foto: Ist/Ptt

Program Pejuang Muda membuka peluang bagi para mahasiswa untuk belajar bersama warga serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemuka masyarakat, tokoh agama setempat serta seluruh stakeholder penggerak sosial di daerah.

Anggota DPR RI Diah Pitaloka mendukung program Pejuang Muda yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin beserta jajaran, dirinya menyambut baik keterlibatan para pemuda

guna menajamkan kepekaan diri, pengetahuan dan kemampuan agar mampu bermanfaat bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini melihat, hadirnya para pemuda juga akan membantu mengawasi program-program Kementerian Sosial hingga tingkat lingkungan terkecil.

“Menurut saya (program Pejuang Muda) ini bagus juga untuk mendapatkan

ilmu sekaligus pengalaman dan untuk program-program Kementerian Sosial juga bisa me-review dan masukan-masukan. Jadi ini satu program yang menurut saya inisiatifnya cukup baik dan melatih kepekaan sosial bagi teman-teman mahasiswa,” jelas Diah.

Selain itu, legislator dapil Jawa Barat III itu berharap dari masukan kritis para mahasiswa bisa menjadi pertimbangan untuk perbaikan kerja di Kementerian Sosial. Salah satunya adalah kelemahan persyaratan program Rumah Layak Tidak Huni (RTLH).

“Misalnya seperti tadi syarat RTLH harus penduduk padahal banyak Kota Bogor yang bukan penduduk. Nah, ini kan masukan-masukan dan bagaimana solusinya. Tadi juga BPJS, walaupun ini bukan di komisi membidangi sosial, tapi pelayanan kesehatan warga tidak mampu kategori PBI masih banyak keluhan. Dan ini masukan-masukan yang kita dapat dari mereka,” papar politisi Fraksi Partai PDI Perjuangan itu.

Ia juga mendorong perbaikan terhadap data di Kementerian Sosial lantaran *margin error* yang menunjukkan 5 sampai 10 persen. Di sisi lain, dalam data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut masih ditemukan data orang meninggal yang masih masuk data kependudukan. Dirinya menekankan data tersebut harus diperbaharui.

“Yang meninggal, ini masuk data terpisah karena takutnya dalam pemilu masuk data pemilih. Ini mungkin masuknya di Disdukcapil karena di Dinsos sudah tidak menerima bantuan tapi di data kependudukan masih tercatat ada,” tandasnya. ●ts/es

Cen Sui Lan: Harapkan Pasar Baru Tanjungpinang Direvitalisasi

“Saya minta Bu Wali Kota Tanjungpinang segera menuntaskan relokasi ini lah. Dan saya konsentrasi urusin dana APBN untuk pembangunannya, pada tahun anggaran 2022 ini. Biar segera dibangun”



Anggota DPR RI Cen Sui Lan saat mengunjungi Pasar Baru, Tanjungpinang yang akan direvitalisasi. Foto: IstiPrima

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepri, Cen Sui Lan melakukan kegiatan reses dengan meninjau langsung Pasar Baru Tanjungpinang yang roboh. Dalam tinjauan yang dilaksanakan Minggu (6/3/2022) pagi, dia didampingi Wali Kota Tanjungpinang Rahma melakukan pertemuan dengan Kepala BP2W Kepri Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan pihak terkait lainnya di Kantor PUPR Tanjungpinang.

Dalam pertemuan tersebut, ia berharap agar Pasar Baru Tanjungpinang segera direvitalisasi. “Saya ingin segera dibangun Pasar Baru Tanjungpinang itu. Termasuk untuk kawasan Pasar KUD di wilayah Pasar Baru itu. Dananya saya ketuk segera. Tapi teknisnya, seperti DED dan RAB segera dituntaskan oleh BP2W dan PUPR,” tegas Cen Sui Lan.

Bagi para pedagang di kawasan pasar yang dibangun akan direlokasi atau dipindahkan ke tempat sementara.

Dia pun meminta kepada Wali Kota Tanjungpinang agar bisa mengatasi hal tersebut sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan para pedagang pasar. Sementara dirinya

sendiri akan mengawal di sektor APBN.

Sebelum berangkat ke Tanjungpinang, Cen Sui Lan sudah berkoordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Menurutnya revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang sudah menjadi prioritas di Kementerian PUPR.

“Kementerian PUPR sudah memutuskan dan menjadikan pembangunan atau revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang ini segera dilaksanakan. Ini sudah prioritas untuk pembangunannya,” tegas Cen Sui Lan.

Berdasarkan laporan yang diterima, Cen Sui Lan mengungkapkan, akibat ambruknya Pasar KUD Pelantar II di Pasar Baru Tanjungpinang itu, ada 95 sepeda motor yang rusak, enam pria dewasa serta 11 orang ibu rumah tangga yang luka. Bahkan ada tujuh orang anak-anak yang menjadi korban luka pada saat kejadian, Sabtu (5/3/2022) kemarin.

“Untuk para korban dalam kejadian pasar ambruk ini, Bu Wako sudah membesuknya di rumah sakit, semalam itu,” pungkas Cen Sui Lan. ●eko/es

Bimantoro Wiyono: Serap Aspirasi Petani Bawang

Sebagai wakil rakyat, mendengarkan dan menyalurkan aspirasi merupakan suatu kewajiban. Banyak Anggota Dewan yang senantiasa menyapa masyarakat di waktu senggangnya untuk menghimpun masukan yang akan diperjuangkannya demi kepentingan rakyat.

Adalah Bimantoro Wiyono, seorang Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra mendengar keluhan kesah petani bawang di Kabupaten Nganjuk akan menurunnya harga bawang. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Bimantoro pada Agenda reses ke II tahun sidang 2021/2022 yang

bertempat di Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, baru-baru ini.

Legislator yang duduk di Komisi III DPR RI ini mengatakan, para petani mengeluh jika harga bawang di musim panen seperti saat ini sedang anjlok. “Kami mendengarkan keluhan kesah masyarakat khususnya para petani bawang terkait harga jual bawang merah yang murah,

sedangkan saat ini masa panen,” ungkapnya.

Mas Bima, sapaan akrabnya juga menegaskan bahwa aspirasi dalam kegiatan reses ini akan disampaikan kepada kementerian terkait untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menstabilkan harga bawang di pasaran.

Selain melakukan serap aspirasi, Mas Bima juga membagikan sembako sebanyak 460 paket dari Partai Gerindra. Sembako tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak pandemi khususnya petani bawang akibat harga jual murah. “Sembako ini sengaja kami bagikan sebagai bentuk peduli khususnya bagi masyarakat petani yang terdampak akibat harga jual Bawang Merah yang sangat murah,” ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, mas Bima juga mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. “Varian Omicron itu mengingatkan kita agar jangan lelah mematuhi protokol kesehatan karena dengan kesehatan perekonomian pun akan semakin membaik,” harapnya. ●tn/es



Anggota DPR RI Bimantoro Wiyono saat menyapa petani bawang di Kabupaten Nganjuk. Foto: Ist/nw

Mohammad Khairul Amri: Maksimalkan Program Pendidikan bagi Masyarakat Paspro

Memaksimalkan program pendidikan bagi masyarakat Pasuruan-Probolinggo (Paspro), merupakan target yang dipasang oleh Anggota DPR RI Mohammad Khairul Amri. Itu adalah salah satu upaya baginya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dapilnya.

Setelah dilantik sebagai Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2019-2024 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (18/2/2022), Politisi yang akrab disapa Gus Aam ini langsung tancap gas. Ia menyapa masyarakat dan akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Paspro.

Gus Aam bertekad untuk membawa sebanyak mungkin program-program yang baik untuk masyarakat Paspro utamanya dalam dunia pendidikan. Ia ingin memberikan bantuan beasiswa untuk generasi penerus bangsa. Tidak ada alasan tidak ada biaya akhirnya putus sekolah. Di sisi lain, ia juga ingin memperjuangkan bagaimana pariwisata di Pasuruan-Probolinggo ini lebih maju dan berkembang demi kemajuan ekonomi rakyat.



Anggota DPR RI M Khairul Amri. Foto: Ist/Prima

“Kebetulan mitra saya di bidang pendidikan, pariwisata, pemuda dan olahraga, hingga perpustakaan. InsyaAllah, akan kami optimalkan untuk masyarakat di sini,” janji Gus

Aam, sapaan akrabnya di dapil Paspro, sebagaimana dia ungkapkan dalam siaran persnya awal Maret 2022.

Dia turun ke dapil menyapa masyarakat, dalam lawatannya ini, Gus Aam memperkenalkan diri sebagai wakil rakyat dari dapil Jatim II. Ia memaparkan banyak pengalaman dan jabatannya. Ia juga memaparkan visi misinya untuk memperjuangkan hak rakyat. Ia juga mendengar kondisi lapangan dan menemukan banyak permasalahan.

Gus Aam mengakui Paspro bukan daerah baru, dia mengaku sudah lama mengenal dua daerah itu 20 tahun lalu. “Saya ingin, amanah yang saya emban ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi lebih utama kepentingan masyarakat sini,” kata Gus Aam.

Ia ingin, keberadaan dan kepercayaan masyarakat terhadapnya sebagai wakil rakyat bisa betul-betul mewakili

kepentingan rakyat. “Mudah-mudahan saya bisa amanah dan memperjuangkan hak-hak rakyat, jadi mereka bisa merasakan dampak positifnya,” papar Gus Aam. ●eko/es

Edward Tannur: Dukung Pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan



Peserta pelatihan diversifikasi olahan ikan yang diinisiasi oleh Anggota DPR RI Irmawan Edward Tannur. Foto: lstr/mvl

Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) berupa ikan menjadi salah satu solusi ampuh menekan angka stunting sekaligus menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bersama dengan Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur menyelenggarakan pelatihan pengembangan diversifikasi olahan ikan untuk masyarakat konstituennya.

Pelatihan tersebut diikuti oleh sebanyak 200 orang perwakilan kelompok, baik berasal dari Kabupaten Kupang maupun Kabupaten Timor Tengah Utara. Dilaksanakan secara daring. Politisi Fraksi PKB itu meminta masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

“NTT punya potensi dan peluang

besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Mari manfaatkan pelatihan dengan sebaik-baiknya agar output-nya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat NTT. Mari bersama-sama berjuang membangun NTT tercinta,” tutur Edward Tannur saat membuka pelatihan tersebut.

Lebih lanjut, ia menekankan pelatihan ini mengedukasi masyarakat untuk membangun kebiasaan mengonsumsi ikan olahan yang kaya protein. Diharapkan dalam waktu jangka panjang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara juga terbentuk generasi yang sehat dan cerdas.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melaksanakan pelatihan pengembangan diversifikasi olahan ikan secara *blended training* di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan pelatihan tersebut turut diinisiasi dan didukung oleh Anggota DPR RI dapil Nusa Tenggara Timur II Edward Tannur.

Pelatihan tersebut tidak hanya sekedar memanfaatkan SDA, akan tetapi juga memberdayakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang unggul agar dapat mengelola sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

“Aspirasi telah saya sampaikan saat rapat-rapat di DPR RI. Karena itu, Saya tunjukkan kepada masyarakat karena mama-mama mereka sudah percayakan saya ke Senayan. Meski saya tidak hadir secara langsung, saya mengapresiasi semua pemateri,” tandas Edward. ●ts/es

Hendrik H. Sitompul: Sumbang Sembako untuk Masyarakat Sumbar



Anggota DPR RI Hendrik H Sitompul saat menyerap aspirasi dari konstituennya. Foto: Ist/Prima

“Terimakasih atas kehadiran saudara-saudaraku, bapak ibu sekalian atas acara syukuran dan sekaligus menjemput aspirasi atau permasalahan yang ada di daerah ini”

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hendrik H. Sitompul, melaksanakan reses sekaligus menjemput aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Utara I Tebing Tinggi, awal Maret lalu.

Ratusan konstituen atau masyarakat Tebing Tinggi, yang sebelumnya pada Pileg 2019 memilih atau mendukung Hendrik Sitompul, menghadiri silaturahmi sekaligus syukuran atas dilantikannya Hendrik Sitompul menjadi anggota DPR RI pada tanggal 18 Februari 2022, serta

pelantikan menjadi anggota DPR RI pada tanggal 2 Maret 2022.

“Kami sudah menyiapkan formulir isian untuk menyampaikan secara tertulis permasalahan yang ada di daerah ini. Begitupun, jika ada yang mau menyampaikan secara langsung, waktu dan tempat kami persilahkan,” tuturnya.

Acara syukuran dan sekaligus menampung aspirasi itu, digelar di Aula CU Tebing Tinggi. Seluruh konstituen tampak akrab dan senang atas kehadiran Hendrik. Semua undangan yang hadir tampak berkeinginan untuk foto bersama dengannya.

Pada kesempatan itu, sejumlah konstituen menyampaikan aspirasinya langsung kepadanya mengenai permasalahan banjir, hingga merusak tanaman khususnya padi. Serta persoalan ijin sekolah, masalah pajak yang mengganggu usaha kredit CU yang ada di Tebing Tinggi.

Menurut Hendrik, dirinya akan mempertanyakan itu pertama kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, jika tidak ada solusi akan dibawa ke Senayan atau ke kantor DPR RI.

“Kami juga punya keterbatasan, permasalahan di daerah tidak semua bisa kami selesaikan, karena ada otonomi daerah. Begitupun, saya akan membawa permasalahan ini, untuk saya sampaikan kepada komisi yang berhubungan dengan masalah itu di DPR RI,” pungkas Hendrik. ●tn/es

Syahrul Aidi Maazat: Perjuangkan Infrastruktur bagi masyarakat Indragiri

Negeri Indragiri yang terdiri dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) membutuhkan anggaran pembangunan serius dari pemerintah pusat. Sebab, dengan kondisi yang ada, masing-masing kabupaten tidak mampu menyelesaikan beban pembangunan yang ada.

Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan hal tersebut setelah sebelumnya lebih dari sepekan berada di perkampungan di Inhil dan Inhu. Ia melihat ada beberapa persoalan mendasar yang harus diperjuangkan, diantaranya adalah

infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Saya sudah dua tahun enam bulan menjabat anggota DPR RI, setiap kali turun baik kewajiban parlemen atau undangan masyarakat selalu menemukan banyak persoalan yang tidak mampu diselesaikan di tingkat kabupaten atau provinsi. Dua kabupaten

tersebut sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat,” terangnya.

Pertama, menurut Syahrul adalah akses transportasi yang buruk. dengan demografi wilayah Indragiri yang berada di atas rawa gambut, menyebabkan harus ada perhatian dalam pembangunan infrastruktur setiap tahunnya. Selain itu hamparan pulau ini tentunya juga membutuhkan jembatan sebagai penghubung.

“Jalan dan jembatan adalah kebutuhan paling mendasar di Indragiri ini. Jika keduanya buruk, maka akses masyarakat akan terbatas,” sebut legislator dapil Riau II itu.

Selain akses transportasi yang buruk, kondisi kedua adalah ketersediaan air bersih. Kawasan gambut yang berada di pesisir Selat Melaka ini menghasilkan air yang berwarna merah. Secara kesehatan air tersebut tidak layak minum dan guna. “Saya beberapa kali ke sana, dan tidur di perumahan masyarakat juga merasakan mandi dengan air merah ini. Mau gimana lagi, inilah kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kita disana,” tambahnya.

Politisi fraksi PKS ini menilai, kondisi infrastruktur dasar yang tidak layak tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pendidikan yang rendah, pelayanan kesehatan yang apa adanya, harga barang yang tak sesuai harapan. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan perhatian lebih ke kawasan seperti ini baik yang ada di Riau atau daerah lainnya.

Saat ini, ia mengakui telah berjuang sepenuhnya untuk menyalurkan APBN ke Inhil dan Inhu. Ada beberapa konsentrasi program pembangunan yang saat ini telah dan akan disalurkan yaitu Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar warga kurang mampu, Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di tingkat kecamatan, pembangunan irigasi persawahan, turap sungai/pantai, MCK, Pamsimas, jembatan dan jalan. Pembangunan jalan nasional dari Rengat hingga ke Jambi juga turut diperjuangkannya. **• bia/es**



Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat (tengah). Foto: Ist/Prima

Ahmad Yohan: Serahkan Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah

Komitmen untuk hadir dan membantu konstituen, senantiasa dipegang teguh oleh para Anggota DPR RI. Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya mereka mengabdikan diri demi kepentingan masyarakat.



Anggota DPR RI Ahmad Yohan (kanan-baju putih) saat menemui konstituennya. Foto: Ist/PTt

Dalam kunjungannya ke daerah pemilihannya Nisa Tenggara Timur I (NTT I), Anggota DPR RI Ahmad Yohan menyerahkan bantuan sosial bagi pembangunan rumah ibadah. Dalam kesempatan itu Yohan menyampaikan komitmennya untuk selalu hadir dan berbagi kepada masyarakat Flores, Lembata dan Alor.

Ia berharap, bantuan yang diberikan itu dapat memacu semangat umat dalam membangun rumah ibadahnya dan tidak terhenti karena kekurangan material bahan bangunan.

“Bagi yang belum mendapatkannya harap dimaafkan dan bersabar. Akan diberikan pada waktu yang akan datang,” ucap Ahmad Yohan beberapa waktu lalu.

Selain menyerahkan sejumlah bantuan bagi pembangunan rumah ibadah, Ahmad Yohan juga menyerahkan bantuan langsung kepada sejumlah pihak lainnya, diantaranya yaitu Panitia Pembangunan Gereja St.Yakobus Welu, Aula Paroki Gereja Katedral Kristus Raja Waiwerang, Kapela St.Antonius Padua, Pohon Sirih Larantuka, Mesjid Nurul Imam

Tanah Werang-Solor Timur, Mushola Watan Bura Dua-Solor Timur, Kapela St.Fransiskus Asisi Kebang Belu Dua-Adonara Tengah, Mesjid Nur Hudin Tanah Puken-Lewobele, Adonara Tengah, Pembangunan Mesjid Asmad Samasoge-Wotan Ulumado dan Mesjid Lamahoda-Adonara.

Meski waktu telah beranjak sore, namun para tamu undangan tetap bertahan dan bersemangat untuk bersilaturahmi dengan wakilnya di Senayan. Beberapa undangan penerima bantuan mengaku bangga dengan sosok politisi Fraksi PAN ini. Pasalnya, sebagai Anggota DPR RI yang tergolong masih sangat muda, Yohan dengan tulus menyatakan akan terus berupaya dan berjuang untuk bisa membantu secara langsung kebutuhan rakyat.

“Terus terang, kami sangat bangga dengan kebesaran dan kerelaan hatinya memenuhi komitmen politiknya. Terima kasih banyak. Kami doakan agar Tuhan tetap memberikannya kesehatan dan kekuatan dalam tugas-tugas panggilan politiknya kedepan,” ujar Lurah Ritaebang Moses Niron.

Senada dengan itu, Ketua Karang Taruna Solor Barat Lambert Hayon juga menyampaikan rasa terima kasih dan doa dukungannya bagi Ahmad Yohan.

“Mewakili generasi muda Solor khususnya, juga sebagai orang muda Flotim (Flores Timur), patut berbangga dengan sosok Ahmad Yohan. Orang Muda Flotim yang mampu tembus di level politik nasional, dan telah membawa pulang hasilnya bagi Lewotana. Sebagai salah satu kelompok orang muda yang mendapat bantuan, kami ucapkan salut dan terima kasih,” pungkasnya. ● dep/es

Achmad Baidowi: Gelar Pasar Murah bagi Warga Kurang Mampu



Anggota DPR RI Achmad Baidowi saat menggelar pasar murah produk minyak goreng. Foto: Ist/Prima

Legislator dapil Jawa Timur IX Achmad Baidowi menggelar pasar murah minyak goreng di sejumlah kecamatan yang ada di Madura. Bakti sosial tersebut menasar warga kurang mampu di daerah setempat dalam bentuk menjual minyak goreng dengan harga murah.

Politisi yang akrab disapa Awiek itu mengatakan, dalam bakti sosial tersebut, pihaknya menjual minyak goreng dengan harga Rp10 ribu per liter. Sementara, harga minyak goreng yang kualitas medium di toko-toko ritel dijual dengan harga Rp16 ribu per liter.

“Kami berkontribusi dalam subsidi harga, sehingga ini diharapkan bisa membantu masyarakat kecil, yang belakangan mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng,” terangnya.

Dalam baksos pasar murah tersebut, sekitar 5.000 liter minyak goreng terjual dengan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebanyak 1.500 liter minyak goreng murah didistribusikan di Kecamatan Palangaan, Kabupaten Pamekasan. Sisanya akan didistribusikan ke kecamatan lain di kabupaten-kabupaten yang ada di Madura.

“Bakti sosial seperti ini akan dilakukan juga di kabupaten-kabupaten di Madura. Bekerjasama

dengan Toko Bagus, banom-banom PPP dan ABC menjual minyak goreng dengan harga murah yaitu 10 ribu per liter,” terangnya.

Sebelum baksos digelar, Awiek juga membagikan kupon kepada warga tidak mampu. Hal ini dilakukannya agar pendistribusian minyak goreng murah bisa berjalan tertib. Kegiatan itu disambut antusias warga, terutama ibu-ibu yang tidak ingin menyalakan momen pasar murah minyak goreng.

Warga Desa Palangaan Laok, Kecamatan Palangaan Musarrafah mengapresiasi kegiatan pasar murah minyak goreng tersebut. Sebab, dengan adanya baksos tersebut, telah membantunya untuk mendapatkan minyak goreng murah. “Minyak goreng sekarang susah didapat. Alhamdulillah, terima kasih dengan bantuan minyak goreng murah,” imbuhnya. ● [bia/es](#)

M. Akbar Kurniawan

Berkuda Sedari Muda

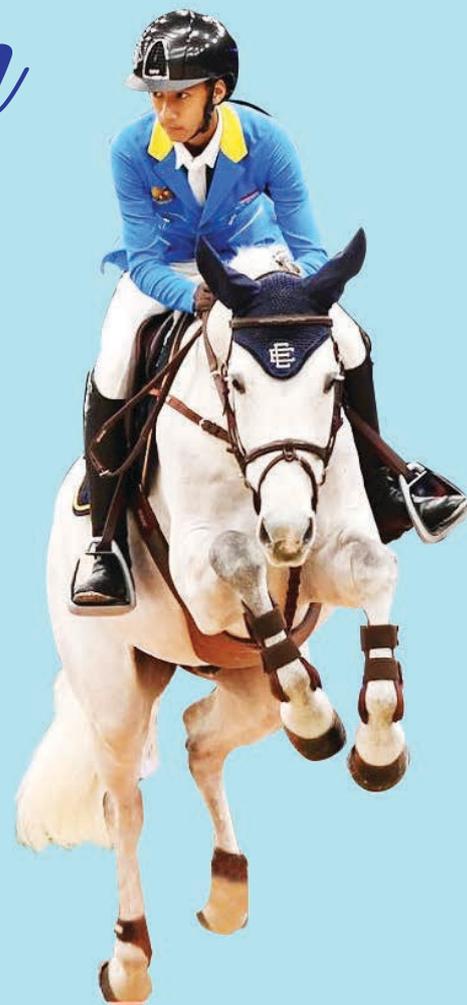
M. Akbar Kurniawan, bukanlah nama yang asing di cabang olahraga berkuda. Meski masih terbilang belia, prestasinya sudah mendunia. Prestasinya yang ditorehkannya di ajang internasional berhasil mengharumkan nama Indonesia. Berikut kisah yang disampaikan pada *Parlementaria*.

Deret *trophy* yang berhasil diraih atlet yang akrab disapa Aan ini, bukanlah *kaleng-kaleng*. Diantaranya di Tahun 2017 ia berhasil meraih Juara 1 Jumping Junior di ajang Longines Hong Kong Masters – CSIJ-B Hong Kong. Terakhir, pada Januari 2022 kemarin, ia berhasil meraih 6 emas dan 3 perak di ajang berkuda tingkat nasional Aarogan Kavelari Cup 2022.

Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Aan sangat menyukai berbagai jenis binatang. Namun, kecintaannya pada kuda memang

terlihat menonjol dibanding hewan lainnya. Terlebih lagi ketika orangtuanya mengajak Aan mengunjungi salah satu tempat wisata yang menyediakan kuda untuk bisa ditunggangi. Tak menunggu waktu lama, Aan yang ketika itu masih kecil, langsung berlari mendekati kuda tersebut. Dengan riang, dan tanpa ada rasa takut sedikitpun ia naik ke punggung kuda wisata.

Singkat cerita, di usia delapan tahun, Aan mengungkapkan bahwa ia bersedia disunat (dikhitan-**red**) namun jika sudah dibelikan kuda. Syarat yang cukup unik bagi anak seusianya. Pasalnya, jika teman-temannya meminta



hadiah sepeda, *skateboard* dan lain sebagainya saat sunat, namun Aan malah minta dibelikan kuda. Hal itu pun akhirnya diamini oleh kedua orangtua Aan, yakni Fatchul Anas dan Ernawati. Jadilah Aan memiliki kuda pertamanya, yang sekaligus menjadi batu pijakannya untuk menekuni olahraga berkuda.

Setelah itu hari-hari nya pun tak pernah jaih dari kuda kesayangannya. Hingga kemudian satu tahun berikutnya, di usia sembilan tahun untuk pertama kalinya Aan mengikuti kejuaraan berkuda AE Kawilarang Cup di tahun 2013. Siapa sangka di debut pertamanya itu Aan meraih juara pertama di kelas *Walk Trot Children*. Bahagia, sudah pasti. Namun yang lebih membahagiakan lagi, prestasi pertamanya itu semakin membuat Aan semangat berlatih kuda. Hingga



M Akbar Kurniawan saat beraksi di atas kudanya. Foto: Doc/Prima



M Akbar Kurniawan saat meraih gelar di salah satu kejuaraan berkuda tingkat internasional. Foto: Doo/Prima

kemudian berbagai kejuaraan pun diikutinya. Mulai dari kejuaraan nasional sampai kejuaraan internasional.

BERKUDA DAN SEKOLAH

Dari berbagai prestasi yang berhasil diraihinya, Aan pun didapuk berbagai penghargaan dari negara. Salah satunya melalui Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Penghargaan sebagai Pelaku Olahraga Berprestasi tahun 2019. Aan memang telah menjadi atlet kuda professional, namun siapa sangka jika sebelumnya ia pun sempat mengalami kecelakaan seperti terjatuh dari kuda. Itu terjadi ketika awal-awal Aan menekuni olahraga berkuda.

Meski sempat terluka, namun itu tidak menghalanginya untuk terus berlatih. Hingga pada akhirnya lagu Indonesia Raya pun berkumandang usai menjuarai ajang Longines Hong Kong Masters – CSIJ-B Hong Kong pada tahun 2017 lalu. Sederet pertandingan bergengsi lainnya pun tengah menantinya. Dalam waktu

dekat misalnya, Aan tengah berusaha untuk bisa lolos dalam seleksi olahraga berkuda di ajang Asian Games 2022 mendatang di Hangzhou-China. Bahkan ia pun berharap kelak bisa mengikuti ajang olahraga tertinggi atau terbesar di dunia, yakni ajang olimpiade.

Di balik berbagai prestasinya itu, Aan menilai saat ini olahraga berkuda memang masih menjadi olahraga bergengsi. Pasalnya biaya yang dikeluarkan untuk olahraga berkuda itu cukup besar alias mahal, terutama untuk pembelian dan perawatan kuda, termasuk jam terbang mengikut pertandingan. Ia berharap, agar pemerintah bisa memberikan berbagai kemudahan dan keringanan biaya dalam memasukkan/membeli kuda dan peralatannya yang saat ini masih harus dibeli dari eropa yang memang terkenal produsen kuda dengan kualitas yang sangat baik.

Terus berprestasi dengan sederet jadwal latihan dan bertanding baik di

kampanye nasional maupun Internasional, tidak membuat pria kelahiran Jakarta, 20 Februari 2004 ini lupa akan dunia akademis. Aan berusaha untuk terus menyeimbangkan antara kegiatan berkuda, baik itu berlatih atau tanding, maupun kegiatan belajar di sekolah. Bahkan ia pun ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler paskibra di sekolahnya.

“Alhamdulillah, saya selalu masuk ranking 3 besar di sekolah. Saya juga masih menjadi anggota Paskibra di sekolah, walaupun belakangan saya sering absen karena waktunya bertepatan dengan waktu bertanding saya. Tapi intinya saya berusaha untuk menyeimbangkan semua kegiatan saya, baik sekolah, berkuda, maupun kegiatan lainnya. Dengan kata lain, saya berusaha terus memberikan terbaik untuk Negara, namun tidak lupa dengan kewajiban di sekolah,” pungkas Siswa Kelas XII SMA Al-Azhar Kelapa Gading ini. ● **ayu/es**



Sekjen DPR RI Indra Iskandar didampingi pejabat di lingkungan Setjen DPR RI melakukan pemukulan gong petanda dimulainya Rapat Kerja Setjen DPR RI. Foto: Bianca/Man

Komitmen Menuju Setjen DPR yang Modern

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan supporting system bagi 575 wakil rakyat yang ada di Gedung Parlemen. Tak sekedar kemampuan, butuh komitmen yang kuat untuk menjadikan lembaga perwakilan rakyat semakin modern dan terbuka sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat.

"Tanpa komitmen, organisasi ini bagai pasir dalam genggaman, terlihat penuh namun begitu dibuka akan hampa tertiuip angin," ujar Indra saat memberikan kata sambutan dalam rapat kerja Setjen DPR RI dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 di Bandung, Jawa Barat, penghujung Februari lalu.

Dalam rapat itu tema yang diangkat ialah 'Mewujudkan Komitmen Bersama Menuju Setjen DPR RU yang Profesional dan Modern'. Untuk mewujudkan capaian tersebut, kata Sekjen,

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengingatkan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan lembaga

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang profesional dan modern. Sebab lembaga yang tanpa komitmen bersama itu, ia mengibaratkan layaknya pasir dalam genggaman.

dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh unit kerja.

"Sebab banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu melainkan karena mereka tidak memiliki komitmen," ujar Indra. Adapun setiap tahun komitmen lembaga Setjen DPR RI telah diikat dalam suatu perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.

Indra pun merasa bersyukur bersyukur bahwa dari 13 Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021, semuanya mencapai target. Bahkan, ada tiga Indikator Kinerja yang di atas target yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI, Jumlah Program Diklat yang memperoleh akreditasi, dan Keterbukaan Informasi Publik.

"Ke depannya kami berharap kualitas kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI semakin meningkat dan semakin banyak kinerja yang dicapai atas tersebut. Saya kira ke depan semua unit harus berkomitmen untuk memiliki titik yang terukur dan tetap memperbaiki capaian yang ada," pungkas Indra.

Pada saat yang bersamaan, Setjen DPR RI juga menggelar rapat kerja untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Kesyukuran DPR RI tahun 2023. Kegiatan itu merupakan langkah dalam mewujudkan komitmen bersama menuju Setjen DPR RI yang profesional. Pada rapat tersebut, Indra Iskandar menyebutkan rencana kerja organisasi untuk tahun depan.

"Rencana kerja yang disusun merupakan penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang terukur," kata Indra dalam sambutannya.

Lebih lanjut Indra mengatakan, kegiatan tersebut mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Setjen Jenderal DPR RI untuk menunjang rencana kerja yang telah ditetapkan. "Selanjutnya ditetapkan beberapa kegiatan prioritas, merupakan kegiatan yang bersifat

"SEBAB BANYAK ORANG GAGAL BUKAN KARENA MEREKA TIDAK MAMPU MELAINKAN KARENA MEREKA TIDAK MEMILIKI KOMITMEN,"

Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Foto: Bianca/Man

signifikan dan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan," katanya.

Dalam menyusun rencana kerja itu, Sekjen menekankan pentingnya komitmen bersama guna menghasilkan rencana kerja dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. "Selain itu satu tujuan rapat kerja hari ini adalah rencana kerja yang telah disusun akan mendukung tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang tercantum di dalam Renstra (Rencana Strategis) Setjen DPR RI," terang Indra.

Hal itu sangatlah penting untuk memastikan arah tujuan dari seluruh unit kerja agar beranjak ke arah yang sama. Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

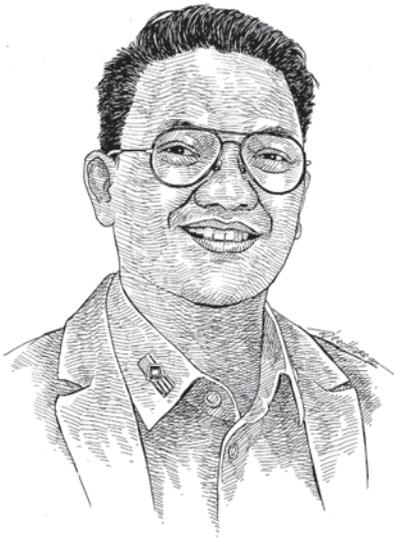
Setjen DPR RI Aulia Sofyan menyatakan harapannya agar hasil rapat kerja ini memberikan manfaat, saran dan masukan konstruktif terhadap penyusunan RKA DPR RI tahun 2023.

"Serta menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang tidak ringan dalam rangka mewujudkan hasil keluaran (output) yang berkualitas dan bermanfaat serta memberikan dampak bagi peningkatan kualitas kinerja Setjen DPR RI," kata Aulia.

Aulia menegaskan, Biro Organisasi dan Perencanaan Setjen DPR RI beserta jajaran siap membantu dan mendampingi seluruh unit kerja untuk menghasilkan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI yang berkualitas dan mencerminkan sasaran kinerja yang akan dicapai. ●tn/es



Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Foto: Bianca/Man



Oleh : Febriansyah Darus
Spesialis kebidanan dan Kandungan,
Konselor laktasi

Dukungan Ayah terhadap Keberhasilan Menyusui

Ketika menulis tentang topik ini, tentu saja pikiran saya langsung kembali ke 8 tahun silam ketika anak pertama saya lahir. Sebelumnya, saya ayah dari 3 orang anak, yang Alhamdulillah semua anak saya memperoleh ASI eksklusif dan tidak pernah merasakan susu formula.

Ketika anak pertama saya lahir, 8 tahun silam, sama seperti kebanyakan ayah baru, tentunya memiliki rasa bangga dan bahagia karena sudah memiliki buah hati. Kehidupan yang tadinya hanya berdua sekarang harus ditemani seorang bayi kecil yang lucu dan menggemaskan. Terlebih dari rasa bangga dan bahagia tersebut ada suatu pertanyaan Haruskah kita mendukung ASI? Bagaimana caranya? Repotkah pemberian ASI? Dan masih banyak sekali pertanyaan menggunung (even sebagai dokter tetapi pertanyaan seperti ini adalah hal yang sangat mendasar menurut saya)

Sebelumnya, saya dan istri memang sudah sepakat untuk memberikan ASI pada anak anak saya. Tetapi ternyata teori berbeda dengan kenyataan yang ada. Pada artikel saya kali ini saya akan membagi pengalaman pribadi saya, bagaimana peran ayah mendukung proses pemberian ASI

KOMITMEN PASANGAN

Kenapa komitmen saya letakkan di urutan pertama, karena tanpa

komitmen, usaha untuk mendukung keberhasilan menyusui adalah hal yang mustahil. Komitmen pemberian ASI ini harus didukung oleh mama-papa serta didukung oleh keluarga dekat. Komitmen papa-mama saja tetapi tidak didukung oleh keluarga dekat tentunya juga bisa menyebabkan kegagalan dalam pemberian ASI. Dari pengalaman saya, banyak sekali pasangan-pasangan baru yang akhirnya mengalah kepada keinginan orang tua dan mertua. Saya contohkan pada beberapa kasus pasien saya, dimana kondisi ASI belum keluar pada hari pertama, si nenek sudah mempersiapkan sepaket susu formula sebagai *backup* pemberian ASI. ASI memang tidak sama keluarnya pada tiap kehamilan dan personal. Jika mama semakin stress melihat kemasan susu formula di kamarnya saat bersalin hal ini tentu bias menyebabkan mamanya mengalah utk memberikan susu formula. Di sini peran ayah atau papa sangat penting untuk meyakinkan kepada keluarga besar untuk bersabar dalam pemberian ASI, bila perlu seorang ayah harus berani

tegas untuk tidak memberikan susu formula untuk menguatkan atau mendukung si istri di kala ASI belum keluar. Bila perlu di sini jika keluarga besar terus mendesak, ada baiknya keluarga juga mendengarkan secara langsung dari konselor laktasi atau dokter terkait bahwa kondisi kondisi teretu masih aman buat ibu dan bayi untuk menunda pemberian susu formula.

PENGETAHUAN DASAR TENTANG ASI

Pengetahuan dasar tentang ASI mutlak diperlukan oleh pasangan suami istri baru, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kegagalan dalam proses menyusui. Pengetahuan tentang proses ASI terbentuk, teknik menyusui yang baik dan benar serta bagaimana teknik penyiapan atau penyimpanan ASI pengetahuan dasar yang wajib diketahui oleh pasangan suami istri sebagai calon orangtua baru. Pengetahuan ini sebaiknya sudah didapatkan pada kehamilan, bukan setelah bayi anda lahir. Dengan pengetahuan yang baik tentunya suami istri bias memahami bagaimana proses ASI itu terjadi

sehingga tidak terburu-buru memberikan susu formula dikala ASI belum lancar keluar. Bagaimana supaya pengetahuan ini didapat papa-mama bias mengikuti kursus ASI seperti manajemen laktasi atau melakukan konseling langsung ke klinik menyusui yang sudah tersedia di beberapa rumah sakit bersalin

MENDUKUNG IMD DAN RAWAT GABUNG

Salah satu cara yang sudah terbukti berhasil menunjang proses menyusui adalah IMD dan rawat gabung. IMD atau Inisiasi Menyusu Dini adalah proses pertama dari keberhasilan menyusui, pada IMD secara tidak langsung akan mendekatkan rasa emosional antara bayi dan mama. Dengan proses ini produksi ASI akan lebih cepat terjadi. Selin itu Ayah tentunya harus mendukung proses rawat gabung yaitu membiarkan ibu dan bayi selalu dalam satu ruang. Dengan proses ini si ibu akan bias melihat dan mencium aroma bayinya secara langsung sehingga akan meningkatkan produksi hormone oksitosin yang akan menstimulasi keluarnya ASI

MEMBANTU MERINGANKAN TUGAS ISTRI

Bulan pertama setelah kelahiran bayi anda adalah fase terberat yang harus dilewati oleh seorang mama. Pada fase ini mama akan menyusui bayinya sesering mungkin, mengganti

popok dan tugas rumah tangga lainnya yang tidak bias dihindari. Peran ayah di sini sangat penting untuk terus memberikan bantuan secara fisik dan moril dengan cara membantu mama mengganti popok di malam hari, bergantian menidurkan bayi sehingga mama baru tetap bias istirahat. Dengan meringankan tugas istri tersebut rasa sayang dan nyaman yang diterima istri tentunya akan semakin bertambah. Sehingga istri tidak stress merasa ditinggalkan atau terbebani oleh kehadiran si buah hati. Dengan demikian produksi hormone oksitosin yang merangsang pengeluaran ASI tidak akan terganggu.

TINGKATKAN HUBUNGAN EMOSIONAL DAN CINTA KASIH

Rasa cinta kasih dan hubungan emosional ini tetap harus dibina. Dengan demikian mama baru akan merasa lebih percaya diri untuk tetap memberikan ASInya

Tips tips ini tentunya adalah sebagian kecil tips yang bias dilakukan oleh seorang papa baru. Untuk itu sekali lagi terus dukung istri kita untuk memberikan ASI kepada buah hati tercinta dengan cara membantu istri meringankan tugasnya, memberikan perhatian lebih kepada istri. Dengan demikian mudah mudahan mama dan papa baru bias terus memberikan ASI sebagai makanan terbaik buat si buah hati.....●



Memburu Cantiknya Destinasi

Kulong Biru

Pulau Bangka memiliki banyak obyek wisata alam yang mempesona. Selain keindahan panorama pantai, terdapat pula destinasi lahan bekas penambangan timah yang eksotis dan mampu memanjakan mata wisatawan.





Kulong Biru. Foto: DewiPrima

Salah satu lahan bekas tambang timah di daerah Bangka Tengah, tepatnya di Desa Air Bara, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dan Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah adalah Kulong Biru (Danau Kaolin).

Kulong merupakan bahasa Bangka yang berarti kolam atau danau bekas galian timah. Ketika tiba di lokasi, pengunjung akan disambut dengan pemandangan alam menakjubkan. Dinding kulong yang berwarna putih menjadi kolaborasi yang sangat cantik dengan birunya air danau. Sekeliling kulong tampak gundukan tanah bekas galian timah yang bentuknya laksana hamparan bukit-bukit salju.

Bila pengunjung menyisir ke arah sebelah kiri, maka akan menemui kulong lain yang berukuran lebih kecil dan berbeda warna. Pada kulong kedua tersebut airnya berwarna hijau cerah. Kedua danau kaolin yang letaknya berdampingan itu saling menebar pesona dengan perbedaan tampilan warnanya yang kontras.

Meski merupakan lahan bekas galian tambang namun suasana udara diseperti lokasi terasa tetap segar. Pengunjung juga dapat mengabadikan setiap moment bahagia bersama orang-orang terdekat di spot swafoto yang terdapat di beberapa sudut danau.

Menurut kabar, lokasi kawasan Kulong Biru pada awalnya merupakan

areal pertambangan bijih timah. Setelah tidak digunakan, lahan bekas galian tambang itu pun kemudian digenangi oleh air hujan. Seiring berjalannya waktu berubah warna menjadi biru karena terkontaminasi oleh kandungan timah yang masih tersisa di kawasan tersebut.

Para pengunjung kawasan obyek wisata Kulong Biru diimbau untuk tidak berenang di danau karena kedalaman kulong mencapai angka 20 meter. Selain itu, masih adanya kandungan timah membuat air di Kulong Biru sangat berbahaya apabila dikonsumsi ke dalam tubuh.

Semakin terkenalnya nama Kulong Biru di kalangan wisatawan membuat destinasi ini mulai dikelola dan banyak berbenah diri. Tersedia beberapa fasilitas bagi pengunjung, seperti lahan parkir yang cukup luas, warung penjual cemilan dan minuman, toilet dan juga toko cinderamata.

Dengan jarak ±60 Km dari Bandara Depati Amir dan sekitar ±15 Km dari Koba, Ibukota Kabupaten Bangka Tengah, Kulong Biru dapat ditempuh melalui jalur darat dengan lama waktu ±60 menit perjalanan dari Kota Pangkal Pinang.

Keunikan Kulong Biru berhasil menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk datang ke destinasi wisata andalan Kabupaten Bangka Tengah itu. Keindahan Kulong Biru juga mampu menembus daftar nominasi Destinasi Unik Terpopuler pada Anugerah Pesona Indonesia 2019. ●dep/es

Alifudin: Pilih Dengarkan Syair Ketika Senggang

Banyak orang beranggapan melakukan kegiatan yang disukai hanyalah membuang-buang waktu saja. Padahal saat sedang bekerja waktu untuk istirahat pun hampir tidak ada apalagi menjalankan hobi. Efeknya akan menjadi jenuh, stres, dan otak seakan tidak berkembang dalam menyerap ide-ide baru.

Hobi ternyata mampu menstimulus otak untuk tetap berkembang. Bukan hanya terkait dengan pekerjaan tetapi juga menyeimbangkan pola hidup. Adalah Anggota DPR RI Alifudin yang kerap mengisi waktu istirahatnya dengan mendengarkan lagu-lagu karya H. Rhoma Irama.

Bagi Alifudin, syair yang diciptakan oleh salah satu legenda dangdut Indonesia ini sarat akan nasihat. Dengan nasihat itu pula, Alifudin banyak melalui hari-harinya dengan semangat dan konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Ada salah satu lagu dari Bang Haji (Rhoma Irama) yang selalu saya ingat. Saya sangat menghayati lagu tersebut, tak jarang air mata menetes ketika merenungkan bait demi bait lirik lagu tersebut. Judulnya, Keramat,” tutur Alifudin kepada **Parlementaria**.

Disampaikan Alifudin, syair lagu tersebut mengandung nasihat akan keutamaan seorang ibu serta mengingatkan kewajiban seorang anak untuk selalu menghormati dan menyayangi ibu.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menerangkan, secara nyata, seorang ibu telah berjuang dengan memepertaruhkan nyawanya selama kurang lebih 9 bulan mengandung anaknya. Kemudian saat melahirkan, ibu masih harus berjuang antara hidup dan mati dengan keinginan melihat anaknya lahir ke dunia dengan selamat.

Bahkan, sambung Alifudin, doa dari seorang ibu sangat sangatlah mujarab. “Kita tidak usah jauh-jauh meminta doa dari orang alim, orang pintar. Cukup basuhlah kaki ibu, mohon agar ia mendoakan kita selaku anaknya, jangan sakiti ia, insyaAllah doanya akan diijabah Allah SWT,” terang Alifuddin.

Memang diakuinya, PKS, partai tempatnya bernaung, adalah salah satu partai politik yang berlandaskan Islam. Sehingga syair-syair karya idolanya tersebut tak jarang dijadikan materi untuk bersyiar. ●es/es



Lepas Alas Menembus Batas

Terkadang untuk mencapai satu lokasi tujuan yang akan disambangi, tim kunjungan kerja Dewan membutuhkan satu tekad dan semangat yang kuat. Sebab tak jarang tim harus menempuh medan yang sulit dan berat, baik dengan berkendara maupun berjalan kaki.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat menuju MIN Denpasar. Foto: Devi/Prima



Salah satunya seperti yang dialami tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI saat akan mendatangi lokasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Denpasar, Provinsi Bali. Di tengah perjalanan menuju lokasi, hujan turun sangat deras. Akibatnya jalanan ke arah tujuan menjadi terendam banjir. Satu persatu mobil rombongan melaju menembus genangan air hingga bisa tiba di muka jalan kecil yang menjadi akses menuju sekolah madrasah yang dituju.

Kondisi lorong gang kecil yang akan dilalui Anggota Dewan juga tak luput dari genangan banjir, sementara hujan turun semakin deras. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI beserta mitra kerja yang mendampingi harus menggulung celana panjang serta mencopot sepatu yang mereka kenakan agar tak basah terkena air.

Meski harus bertelanjang kaki menembus banjir disepanjang jalan itu namun tidak menyurutkan niat dan langkah para wakil rakyat tersebut untuk menyerap aspirasi dan keluhan yang ingin disampaikan pihak madrasah.

Dialog antara Anggota DPR dengan Kepala Madrasah berlangsung di ruang kelas lantai dua yang halamannya harus terus dibersihkan agar tampiasan air hujan tidak ikut masuk ke dalam ruang pertemuan. Berbagai keluhan dan harapan yang disampaikan pihak madrasah menjadi bahan masukan penting bagi dewan untuk mem bahasny a dengan kementerian terkait di Senayan.

Sebelum beranjak keluar dari halaman madrasah, beberap anggota dewan sempat berbincang dengan para siswa yang hadir di sekolah. Mereka kagum akan semangat para siswa yang tetap semangat bersekolah meski di tengah banjir yang menggenangi jalanan sekolah dan lebatnya guyuran hujan. ● dep/es



Inter-Parliamentary Union
For democracy For everyone.

The 144th IPU (Inter-Parliamentary Union)

**Assembly & Related
Meetings,
Nusa Dua, Indonesia,
20-24 March 2022**

